



**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SEBELUM DAN
SESUDAH MENJADI PAJAK DAERAH KABUPATEN JEMBER
DENGAN KONSEP *VALUE FOR MONEY***

SKRIPSI

Oleh

KUSDIAN DWI PRASASTI

NIM. 120810301068

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SEBELUM DAN
SESUDAH MENJADI PAJAK DAERAH KABUPATEN JEMBER
DENGAN KONSEP *VALUE FOR MONEY***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

KUSDIAN DWI PRASASTI

NIM. 120810301068

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

PERSEMBAHAN

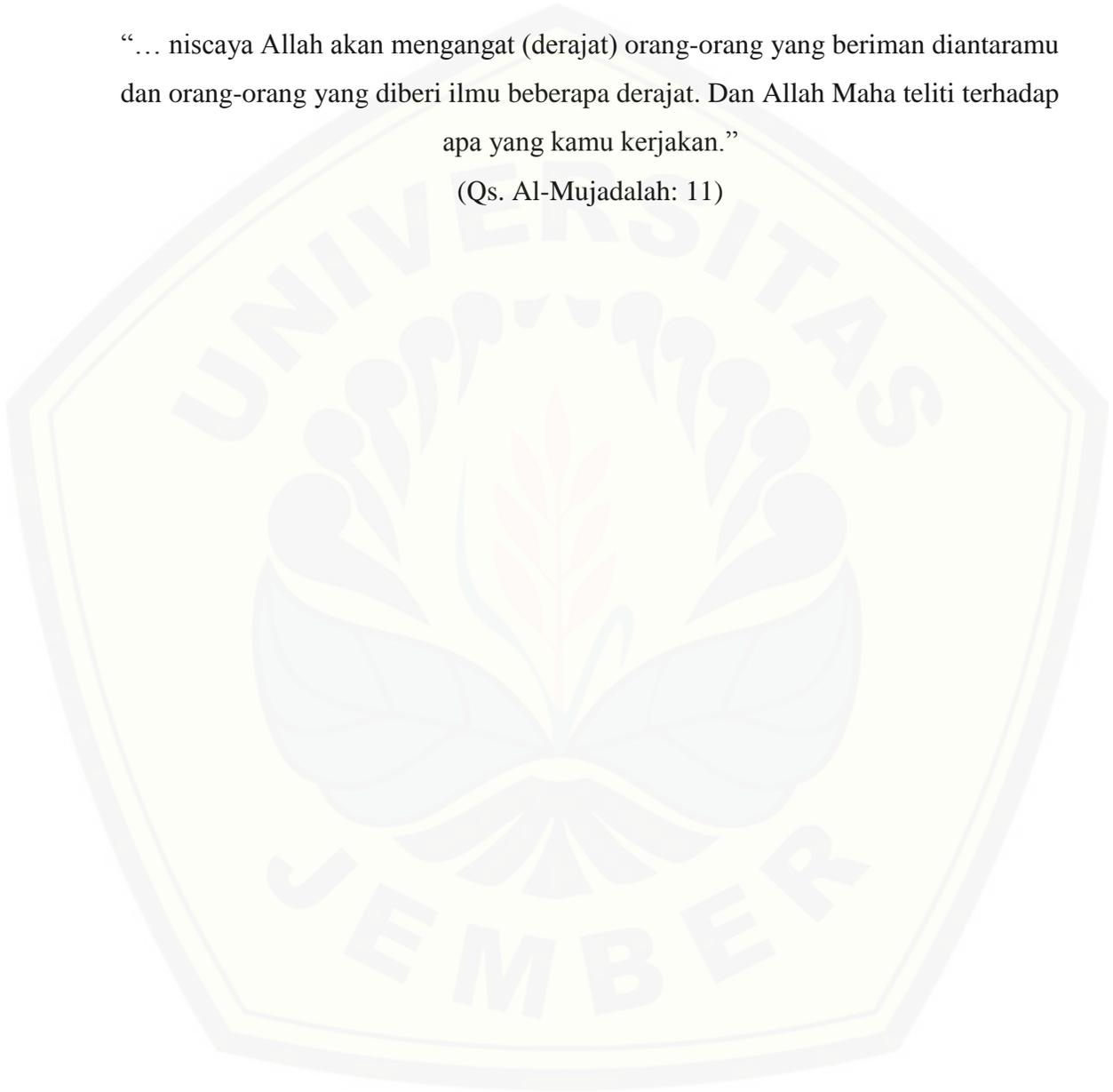
Segala puji hanya bagi Allah SWT, dengan rasa syukur skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu dan ayah tercinta, Sri Rahayu dan Ended Kusnadi atas segala doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti;
2. Moh. Zulfi Kurniawan yang senantiasa memberi doa, motivasi, dan bantuannya;
3. Kakak Ade Rima Wardani, adik Triana Rahmadani, Moch Syarif Hidayatullah, dan Pristiwati Handayani Seftania, atas doa dan dukungannya;
4. Guru-guru dalam kehidupan penulis atas ilmu, pengetahuan, dan jasa yang telah diberikan.
5. Teman terbaik Ade, Fenny, Nofita, Pulungsari, Risqa, Rinda, Cici, Sherly dan seluruh rekan Akuntansi UNEJ 2012 atas bantuan dan dukungannya;
6. Almamater Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“... niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

(Qs. Al-Mujadalah: 11)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kusdian Dwi Prasasti

NIM : 120810301068

Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SEBELUM DAN SESUDAH MENJADI PAJAK DAERAH KABUPATEN JEMBER DENGAN KONSEP *VALUE FOR MONEY*.

Konsentrasi : Perpajakan/Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan termasuk karya jiplakan, kecuali terdapat kutipan yang sudah saya sebutkansumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Oktober 2016

Yang menyatakan,

Kusdian Dwi Prasasti

NIM 120810301068

SKRIPSI

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SEBELUM DAN
SESUDAH MENJADI PAJAK DAERAH KABUPATEN JEMBER
DENGAN KONSEP *VALUE FOR MONEY***

Oleh

Kusdian Dwi Prasasti

NIM 120810301068

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Nining Ika Wahyuni, S.E., M.Sc., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. H. Djoko Supatmoko, M.M., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebelum dan Sesudah menjadi Pajak Daerah Kabupaten Jember dengan Konsep *Value For Money*.
Nama Mahasiswa : Kusdian Dwi Prasasti
NIM : 120810301068
Jurusan : S1 AKUNTANSI
Tanggal Persetujuan : 14 Maret 2016

Pembimbing I

Pembimbing II,

Nining Ika Wahyuni, S.E., M.Sc., Ak.
NIP. 19830624 200604 1 001

Drs. Djoko Supatmoko, M.M., Ak.
NIP. 19550227 198403 1 001

Yang Menyetujui,
Mengetahui,
Ketua Program Studi
S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.
NIP. 19710727 199512 1 001

**PENGESAHAN
JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SEBELUM DAN
SESUDAH MENJADI PAJAK DAERAH KABUPATEN JEMBER
DENGAN KONSEP *VALUE FOR MONEY***

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Kusdian Dwi Prasasti

NIM : 120810301068

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

10 Oktober 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak. (.....)
NIP. 19780927 200112 1 002

Sekretaris : Dr. Alwan Sri Kustonoo, S.E., M.Si., Ak. (.....)
NIP.19720416 200112 1 001

Anggota : Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M., Ak. (.....)
NIP. 19710727 199512 1 001

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

FOTO

4 x 6

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.

NIP. 196306141990021001

Kusdian Dwi Prasasti

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Banunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah Kabupaten Jember, faktor pendukung dan faktor penghambat pengalihan PBB-P2 dan kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah berdasarkan *Value for Money* yang merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu: (1) ekonomi, (2) efisiensi, (3) efektivitas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kombinasi kuantitatif dan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode analisis data pada penelitian kuantitatif menggunakan *Wilcoxon Sign Rank Test* sedangkan pada penelitian kualitatif menggunakan wawancara dan dokumentasi secara triangulasi teknik dan *member check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan persiapan pengalihan pengelolaan PBB-P2 seperti regulasi, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, kerjasama pihak terkait, dan sosialisasi. Berdasarkan *Wilcoxon Sign Rank Test* menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah Kabupaten Jember berdasarkan elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dengan rata-rata penerimaan PBB-P2 sesudah menjadi pajak daerah meningkat.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, PBB-P2

Kusdian Dwi Prasasti

Accounting Department, Economic and Business Faculty, Jember University

ABSTRACK

This research aims to know the transfer planning of Property Taxes in Rural and Urban becoming local tax in Jember, enabling factors and inhibiting factors the transfer of Property Taxes in Rural and Urban, and the performance of the Jember District Revenue Service in receipt of Property Taxes in Rural and Urban before and after becoming the local tax based on the Value for Money which is a public sector organization management concept based on three main elements, namely (1) economic, (2) efficiency, and (3) effectiveness. This research by using mix of quantitative and qualitative study with descriptive method. Analysis data of qualitative research by used interviews and documentation with techniques triangulation and member check, whereas quantitative research by used Wilcoxon Sign Rank Test. Research results indicate that the Jember Local Government has made the preparation to transfer Property Taxes in Rural and Urban becoming local tax like a regulations, human resources, infrastructures, corporation related parties and socialization. While based on Wilcoxon Sign Rank Test showed that there are different receipt of Property Taxes in Rural and Urban before and after becoming the local tax based on the elements of economic, efficiency, and effectiveness with, average reception of Property Taxes in Rural and Urban after becoming local tax is increases.

Keywords : *Financial Performance, Property Taxes in Rural and Urban*

RINGKASAN

Analisis Perbandingan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebelum dan Sesudah menjadi Pajak Daerah Kabupaten Jember dengan Konsep *Value for Money*; Kusdian Dwi Prasasti; 120810301068; 2016; 112 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 1 Januari 2010 memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya dikelola pusat

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka setiap aktivitas instansi tersebut harus diukur. Pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan masing-masing satuan kerja yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya, demikian pula dalam penerimaan dan pengelolaan PBB-P2 perlu dilakukan pengukuran kinerja Dinas Pendapatan untuk menilai akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2009:127) analisis *Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja keuangan pada organisasi pemerintahan. Halim (2007:335) memberikan pengertian *Value for Money* sebagai konsep pencarian dan penggunaan dana pemerintah daerah yang menerapkan prinsip 3E yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Kabupaten Jember merupakan Kabupaten di Jawa Timur yang telah melaksanakan pengalihan pengelolaan PBB-P2 pada tahun 2013. Setelah melakukan pengalihan PBB-P2, Kabupaten Jember melalui Dinas Pendapatan melakukan semua

kegiatan perpajakan yang berkaitan dengan PBB-P2. Data dari Dinas Pendapatan Kabupaten Jember menunjukkan target penerimaan dan realisasi pencapaian PBB-P2 tahun 2010-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan persentase ketercapaian penerimaan berfluktuasi. Realisasi penerimaan PBB-P2 selama enam tahun terakhir belum mencapai hingga 100%. Persentase penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 88.57% sedangkan terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 62.21%. Namun hal ini belum dapat menjadi pengukuran kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dalam penerimaan PBB-P2 karena menurut Halim (2004:152) perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaannya mencerminkan tingkat efektivitas. Dengan konsep *Value for Money* maka penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai berdasarkan elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan pengalihan pengelolaan PBB-P2 Kabupaten Jember, apakah faktor pendukung dan penghambat pengalihan PBB-P2 Kabupaten Jember, apakah terdapat perbedaan kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah berdasarkan elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Objek penelitian yaitu Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dengan sumber data antara lain target BOP PBB-P2, realisasi BOP PBB-P2, target penerimaan PBB-P2, realisasi penerimaan PBB-P2, serta wawancara dengan pihak terkait. Analisis data untuk penelitian kuantitatif menggunakan teknik triangulasi dan *member check* sedangkan untuk penelitian kualitatif dengan pengolahan data SPSS versi 21.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan persiapan yang diawali dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Jember, namun SOP yang

berkaitan dengan PBB P2 masih belum disahkan. Jumlah karyawan untuk pengelolaan PBB-P2 berjumlah 37 karyawan dan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember melakukan upaya untuk mengembangkan kompetensi SDM. Untuk sarana dan prasarana seperti fasilitas perkantoran, perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan secara bertahap terpenuhi. Dinas Pendapatan juga melakukan kerjasama dan sosialisasi guna mendukung keberhasilan pengalihan pengelolaan PBB-P2. Faktor pendukung proses peralihan PBB-P2 di Kabupaten Jember antara lain: tersedianya pembiayaan dan kerjasama pihak KPP Pratama Jember dan SKPD terkait. Sedangkan faktor penghambat antara lain terbatasnya SDM yang berkompotensi, kurangnya kesadaran masyarakat dan kecurangan yang dilakukan aparat pemungut.

Berdasarkan hasil analisis data *Wilcoxon Signed Rank Test* rasio ekonomi menunjukkan nilai 0.000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikan yang telah ditetapkan ($\alpha = 0.05$), maka terdapat perbedaan tingkat ekonomi sebelum dan sesudah PBB-P2 menjadi pajak daerah. Tingkat ekonomi kinerja penerimaan PBB-P2 sebelum menjadi pajak daerah sebesar 156% dan sesudah menjadi pajak daerah sebesar 219%, hal ini menunjukkan secara ekonomi kinerja setelah pengalihan PBB-P2 meningkat dengan kategori sangat ekonomis. Rasio efisiensi menunjukkan nilai 0.000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikan yang telah ditetapkan ($\alpha = 0.05$), maka terdapat perbedaan tingkat efisiensi sebelum dan sesudah PBB-P2 menjadi pajak daerah. Tingkat efisiensi kinerja penerimaan PBB-P2 sebelum menjadi pajak daerah sebesar 9% dan sesudah menjadi pajak daerah sebesar 3.3%, hal ini menunjukkan secara efisiensi kinerja setelah pengalihan PBB-P2 meningkat dengan kategori sangat efisien. Rasio efektivitas menunjukkan nilai 0.001 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikan yang telah ditetapkan ($\alpha = 0.05$), maka terdapat perbedaan tingkat efektivitas sebelum dan sesudah PBB-P2 menjadi pajak daerah. Tingkat efektivitas kinerja penerimaan PBB-P2 sebelum menjadi pajak daerah sebesar 64% dan sesudah menjadi pajak daerah sebesar 71%, hal ini menunjukkan secara efektivitas kinerja setelah pengalihan PBB-P2 meningkat dengan kategori kurang efektif.

PRAKATA

Segala puji hanya bagi Allah SWT atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebelum dan Sesudah menjadi Pajak Daerah Kabupaten Jember dengan Konsep *Value for Money*”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas bantuan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

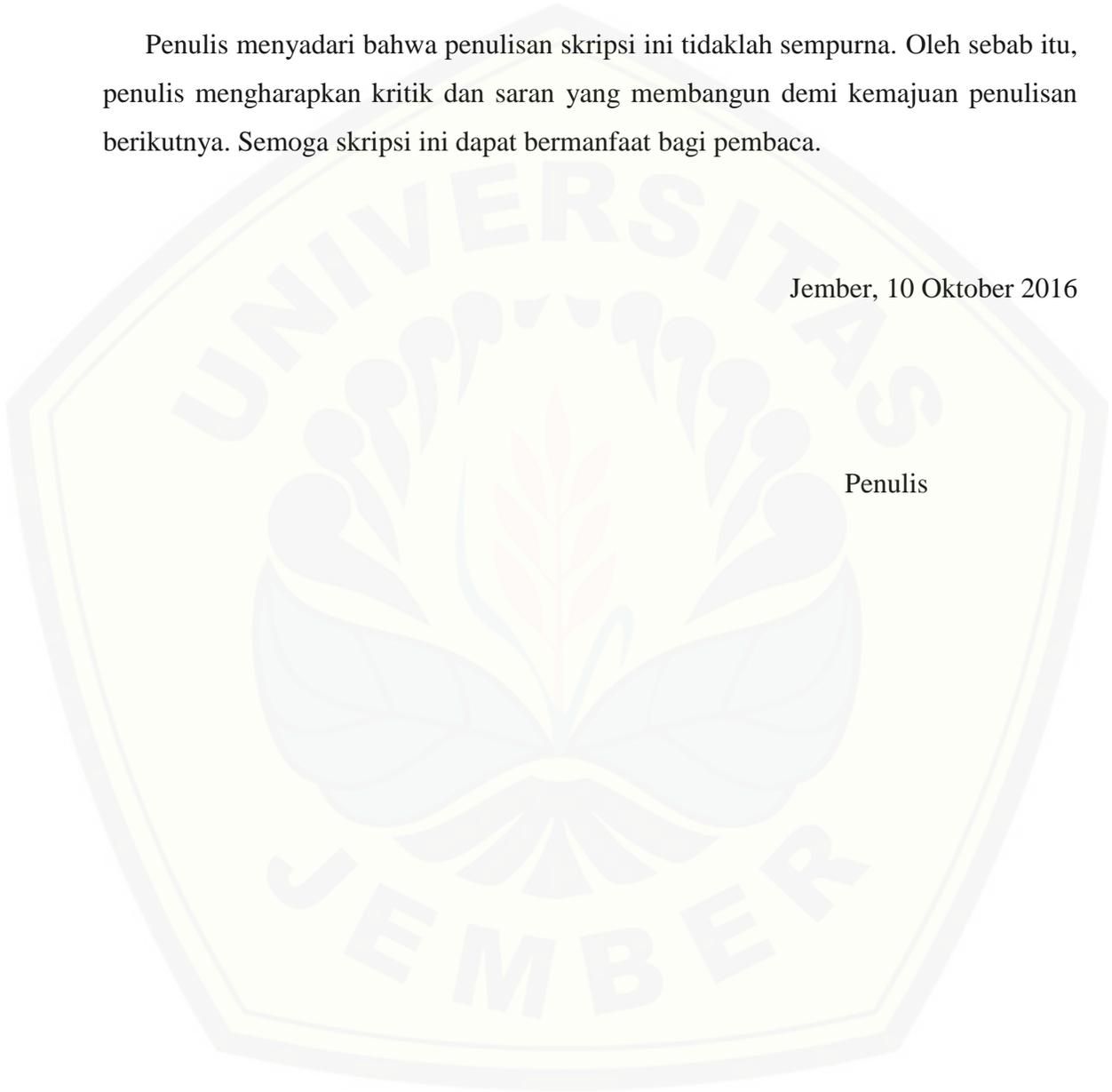
1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Phd selaku Rektor Universitas Jember;
2. Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si., Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Nining Ika Wahyuni, S.E., M.Sc., Ak, selaku dosen pembimbing utama dan Drs. H. Djoko Supatmoko, M.M., Ak selaku dosen pembimbing anggota;
6. Seluruh bapak dan ibu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, khususnya pada Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat;
7. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
8. Kedua orang tua dan keluarga besar atas doa dan dukungannya;
9. Guru-guru di kehidupan penulis yang sangat berjasa;
10. Semua rekan seperjuangan di kampus atas dukungan dan bantuannya;

11. Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dan semua pihak yang turut membantu yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidaklah sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan penulisan berikutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 10 Oktober 2016

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah.....	5
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teori	11

	Halaman
2.2.1 Pajak Daerah	11
2.2.1.1 Pengertian Pajak Daerah	11
2.2.1.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah	11
2.2.1.3 Fungsi Pajak	12
2.2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	14
2.2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak Daerah	15
2.2.2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	16
2.2.2.1 Pengertian.....	16
2.2.2.2 Dasar Hukum	16
2.2.2.3 Objek Pajak	16
2.2.2.4 Nilai Jual Objek Pajak.....	17
2.2.2.5 Objek Pajak Tidak Kena Pajak	17
2.2.2.6 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak	18
2.2.2.7 Subjek Pajak dan Wajib Pajak	18
2.2.2.8 Tarif Pajak.....	19
2.2.2.9 Perhitungan Besaran Pokok PBB-P2	19
2.2.3 Pengalihan Pengelolaan PBB-P2	19
2.2.4 Pengukuran Kinerja Sektor Publik	21
2.2.5 <i>Value for Money</i>	22
2.2.5.1 Pengertian.....	22
2.2.5.2 Manfaat	23
2.2.5.3 Langkah Pengukuran.....	24
2.3 Kerangka Konseptual	25
2.4 Pengembangan Hipotesis	25
2.4.1 Kinerja Dinas Pendapatan berdasarkan Elemen Ekonomi	25
2.4.2 Kinerja Dinas Pendapatan berdasarkan Elemen Efisiensi.....	26
2.4.3 Kinerja Dinas Pendapatan berdasarkan Elemen Efektivitas ...	27

	Halaman
BAB 3. METODE PENELITIAN	29
3.1 Objek dan Jenis Penelitian	29
3.2 Populasi dan Sampel	29
3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Teknik Analisis Data	31
3.6 Keabsahan Data	36
3.7 Uji Normalitas	36
3.8 Uji Hipotesis	37
3.9 Kerangka Pemecahan Masalah	38
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	39
4.1.1 Profil Kabupaten Jember.....	39
4.1.2 Profil Dinas Pendapatan Kabupaten Jember	40
4.1.2.1 Visi, Misi, dan Kebijakan	40
4.1.2.2 Struktur Organisasi	41
4.2 Hasil	45
4.2.1 Kesiapan Peralihan PBB-P2.....	45
4.2.1.1 Persiapan Regulasi	45
4.2.1.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia.....	47
4.2.1.3 Sarana dan Prasarana Pendukung.....	48
4.2.1.4 Kerjasama Pihak Terkait.....	48
4.2.1.5 Sosialisasi.....	49
4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengalihan Pengelolaan PBB-P2.....	50
4.2.3 Perbandingan Kinerja Elemen Ekonomi	51
4.2.4 Perbandingan Kinerja Elemen Efisiensi.....	55
4.2.5 Perbandingan Kinerja Elemen Efektivitas	59

	Halaman
4.3 Statistik Deskriptif	63
4.4 Uji Normalitas	65
4.5 Analisis <i>Wilcoxon Sign Rank Test</i>	65
4.6 Pembahasan	68
4.6.1 Kesiapan Peralihan PBB-P2.....	68
4.6.1.1 Persiapan Regulasi	68
4.6.1.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia.....	69
4.6.1.3 Sarana dan Prasarana Pendukung.....	70
4.6.1.4 Kerjasama Pihak Terkait	71
4.6.1.5 Sosialisasi.....	72
4.6.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengalihan Pengelolaan PBB-P2.....	72
4.6.3 Perbandingan Kinerja Elemen Ekonomi	73
4.6.4 Perbandingan Kinerja Elemen Efisiensi.....	75
4.6.5 Perbandingan Kinerja Elemen Efektivitas	77
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN.....	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Keterbatasan.....	82
5.3 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

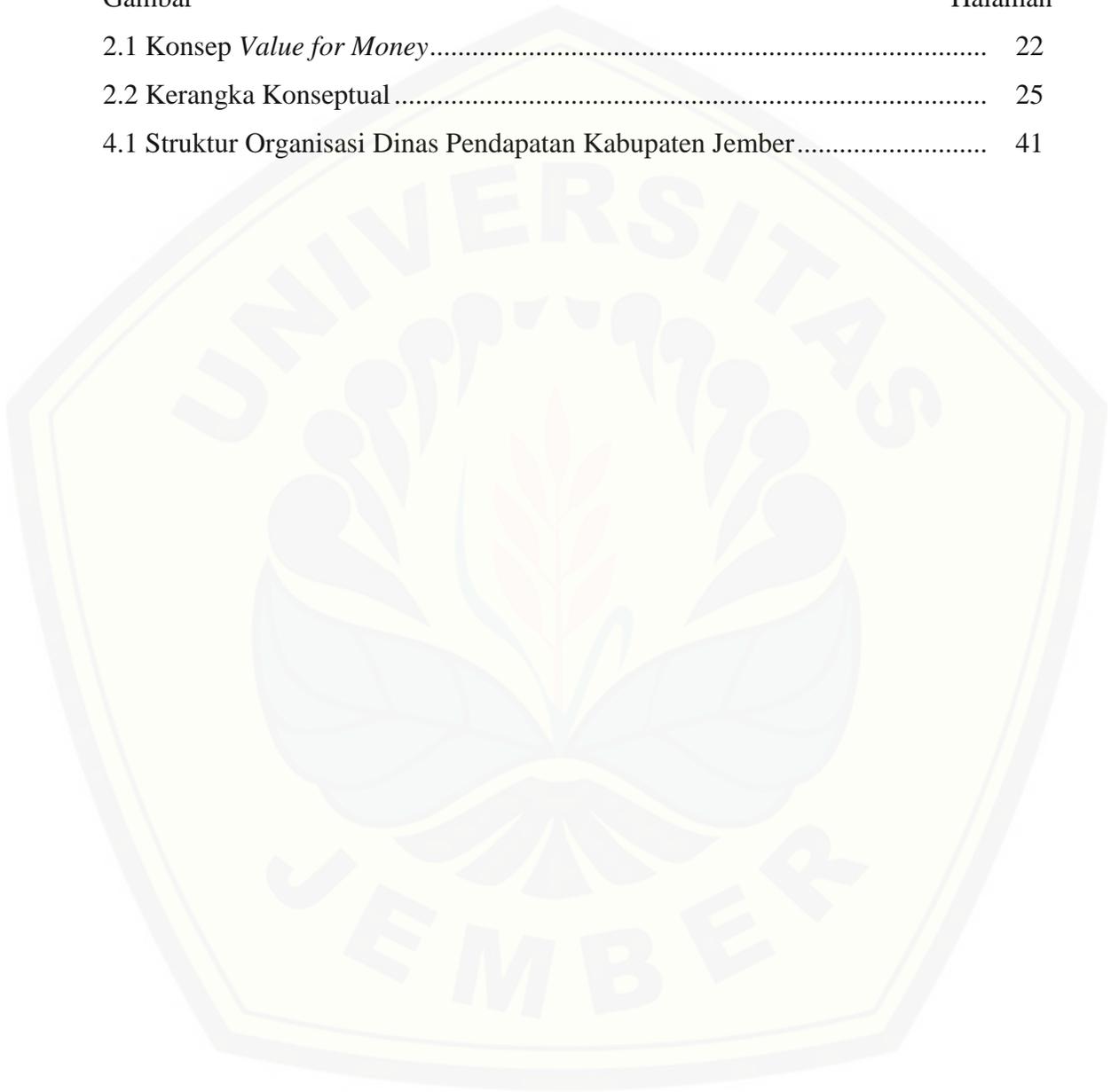
Tabel	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember Tahun 2010 - 2015	3
3.1 Kriteria Ekonomi Kinerja Keuangan	33
3.2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	34
3.3 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan.....	35
4.1 Rasio Ekonomi Kinerja Penerimaan PBB-P2 Kecamatan se – Kabupaten Jember Tahun 2010 - 2015.....	52
4.2 Tingkat Ketercapaian Rasio Ekonomi Kinerja Penerimaan PBB-P2 Kecamatan se – Kabupaten Jember Tahun 2010 - 2015	53
4.3 Tingkat Ekonomi Kinerja Kinerja Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember Tahun 2010 - 2015.....	54
4.4 Rasio Efisiensi Kinerja Penerimaan PBB-P2 Kecamatan se – Kabupaten Jember Tahun 2010 - 2015.....	56
4.5 Tingkat Ketercapaian Rasio Efisiensi Kinerja Penerimaan PBB-P2 Kecamatan se – Kabupaten Jember Tahun 2010 - 2015	57
4.6 Tingkat Efisiensi Kinerja Kinerja Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember Tahun 2010 - 2015.....	58
4.7 Rasio Efektivitas Kinerja Penerimaan PBB-P2 Kecamatan se – Kabupaten Jember Tahun 2010 - 2015.....	60
4.8 Tingkat Ketercapaian Rasio Efektivitas Kinerja Penerimaan PBB-P2 Kecamatan se – Kabupaten Jember Tahun 2010 - 2015	61
4.9 Tingkat Efektivitas Kinerja Kinerja Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember Tahun 2010 - 2015.....	62
4.10 Statistik Deskriptif	63
4.11 Uji Normalitas <i>Kolmogorov Smirnov</i>	65

Tabel	Halaman
4.12 <i>Wilcoxon Sign Rank Test</i>	66
4.13 <i>Test Statistics</i>	67
4.14 Hasil Pengujian Perbedaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember dalam Penerimaan PBB-P2 Sebelum dan Sesudah menjadi Pajak Daerah	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Konsep <i>Value for Money</i>	22
2.2 Kerangka Konseptual.....	25
4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1. Daftar Sampel.....	86
LAMPIRAN 2. Daftar Target dan Realisasi BOP PBB Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Jember	87
LAMPIRAN 3. Daftar Target dan Realisasi PBB Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Jember	93
LAMPIRAN 4. Rasio Ekonomi	98
LAMPIRAN 5. Rasio Efisiensi.....	100
LAMPIRAN 6. Rasio Efektivitas	101
LAMPIRAN 7. Hasil Wawancara.....	102
LAMPIRAN 8. Surat Penelitian	112

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang - Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara resmi diberlakukan pada 1 Januari 2010 memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya dikelola pusat. PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Ratuela, 2015).

Pengalihan PBB-P2 kepada daerah dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya (Napitupulu dan Budiarmo, 2015). PBB-P2 yang pada awalnya merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu, sejak berlakunya Undang - Undang Nomor 28 tahun 2009 maka seluruh penerimaan dari PBB-P2 adalah hak daerah karena kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan diselenggarakan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota).

Berdasarkan Pasal 180 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, masa transisi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah sejak 1 Januari 2010 hingga 31 Desember 2013. Selama masa transisi tersebut, daerah yang telah siap dapat segera melakukan pemungutan PBB-P2 dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang PBB-P2 sebagai dasar hukum pemungutan. Sebaliknya, apabila hingga 31 Desember 2013 daerah belum menetapkan peraturan daerah tentang PBB-P2, maka daerah tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan

pemungutan PBB-P2, dan seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan tidak dibebankan kewajiban membayar PBB-P2 (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2014:1).

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka setiap aktivitas instansi tersebut harus diukur. Pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan masing-masing satuan kerja yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya, demikian pula dalam penerimaan dan pengelolaan PBB-P2 perlu dilakukan pengukuran kinerja Dinas Pendapatan untuk menilai akuntabilitas. Secara formal pengukuran kinerja Dinas Pendapatan Daerah yang disajikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak lebih dari sebuah evaluasi mandiri yang pada akhirnya memunculkan potensi konflik kepentingan atas hasil evaluasi (Mustafa dan Halim, 2009).

Menurut Mardiasmo (2009:127) analisis *Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja keuangan pada organisasi pemerintahan. Halim (2007:335) memberikan pengertian *Value for Money* sebagai konsep pencarian dan penggunaan dana pemerintah daerah yang menerapkan prinsip 3E yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *Value for Money* yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Kabupaten Jember merupakan Kabupaten di Jawa Timur yang telah melaksanakan pengalihan pengelolaan PBB-P2 pada tahun 2013. Setelah melakukan pengalihan PBB-P2, Kabupaten Jember melalui Dinas Pendapatan melakukan semua kegiatan perpajakan yang berkaitan dengan PBB-P2. Berikut data dari Dinas Pendapatan Kabupaten Jember menunjukkan target dan realisasi penerimaan PBB-P2 sebelum pengalihan tahun 2010 - 2012 dan setelah pengalihan tahun 2013 - 2015.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember
Tahun 2010-2015

Tahun	Target Penerimaan PBB-P2	Realisasi Penerimaan PBB-P2	Persentase
Sebelum menjadi pajak daerah			
2010	Rp 25.257.616.275,00	Rp 15.713045.795,00	62.21%
2011	Rp 25.644.787.641,00	Rp 16.612.707.434,00	64.78%
2012	Rp 26.021.949.476,00	Rp 17.066.108.802,00	65.58%
Sesudah menjadi pajak daerah			
2013	Rp 29.077.320.967,00	Rp 24.027.617.777,00	82.63%
2014	Rp 48.790.806.346,00	Rp 35.171.193.888,00	72.09%
2015	Rp 49.500.378.194,00	Rp 31.379.560.860,00	63.39%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Jember (data diolah).

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember periode 2010-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2016 mengalami penurunan. Sedangkan persentase ketercapaian penerimaan setiap tahunnya berfluktuasi. Persentase penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 88.57% sedangkan terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 62.21%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jember memiliki potensi yang baik dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sari (2016) yang berjudul Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi, efektivitas, dan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah sebelum dan sesudah pengalihannya dengan rentan waktu 2011-2014. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dan metode analisis dengan analisis trend. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi Kabupaten Jember menunjukkan

kriteria sangat efisien, tingkat efektivitas menunjukkan kriteria kurang efektif, dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil. Berdasarkan penelitian tersebut maka penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) namun dengan beberapa perbedaan antara lain pertama penelitian ini menggunakan konsep *Value for Money*, yaitu konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas, sehingga penelitian ini menambahkan satu variabel dari penelitian sebelumnya yaitu ekonomi. Kedua rentan waktu penelitian ini tahun 2010 – 2015 sehingga memperluas penelitian sebelumnya, dan ketiga penelitian ini menggunakan *mix method* yaitu penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif sehingga penelitian ini selain memahami tentang realita penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Jember juga melakukan pengujian teori melalui pengukuran variabel dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perbandingan Kinerja Sebelum dan Sesudah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah Kabupaten Jember dengan Konsep *Value for Money***”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diidentifikasi beberapa masalah antara lain:

1. Adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah Kabupaten Jember.
2. Pentingnya mengukur perbandingan kinerja sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian dapat dibahas dengan tuntas serta terfokus, maka diperlukan pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini berfokus pada kesiapan pengalihan, faktor pendukung dan penghambat pengelolaan PBB-P2 Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
2. Penelitian ini menitikberatkan pada pengukuran perbedaan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui Dinas Pendapatan dalam pemungutan PBB-P2 sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah berdasarkan konsep *Value for Money*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi fokus penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana kesiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah Kabupaten Jember?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Jember?
3. Apakah terdapat perbedaan kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah berdasarkan elemen ekonomi?
4. Apakah terdapat perbedaan kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah berdasarkan elemen efisiensi?
5. Apakah terdapat perbedaan kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah berdasarkan elemen efektivitas?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di atas, maka dapat tujuan penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui kesiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Jember menjadi pajak daerah.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah berdasarkan elemen ekonomi.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah berdasarkan elemen efisiensi.
5. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah berdasarkan elemen efektivitas.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dengan analisis *Value for Money*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

Diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah sehingga bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan sebagai penambahan pengetahuan tentang kinerja Pemerintah Daerah dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

c. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat memperdalam ilmu dalam bidang sektor publik, sebagai referensi melakukan penelitian sejenis, dan kritis terhadap kinerja pemerintahan.

d. Bagi Penulis

Diharapkan dapat sebagai wadah untuk menerapkan ilmu yang dipelajari terutama dibidang sektor publik.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini perlu dihimpun hasil-hasil penelitian terdahulu agar dapat mengarahkan penulis pada pokok permasalahan yang tepat sehingga sesuai dengan tujuan. Penelitian-penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

Sari (2016) yang berjudul Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi, efektivitas, dan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah sebelum dan sesudah pengalihannya dengan rentan waktu 2011-2014. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dan metode analisis dengan analisis trend. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi Kabupaten Jember menunjukkan kriteria sangat efisien, tingkat efektivitas menunjukkan kriteria kurang efektif, dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil.

Bolowantu (2015) yang berjudul Analisis Perbandingan Penerimaan Sebelum dan Sesudah Desentralisasi PBB menjadi PBB-P2 pada Pemerintah Kota Gorontalo. Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah desentralisasi PBB menjadi PBB-P2 pada Pemerintah Kota Gorontalo. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Gorontalo. Sampel yang digunakan adalah laporan realisasi PBB-P2 selama periode 2009-2014. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis *t paired test* atau uji statistik perbedaan antara periode sebelum dan sesudah desentralisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah desentralisasi untuk nilai nominal.

Hermansyah (2015) yang berjudul Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dispenda Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu melakukan wawancara kepada responden yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Kota Makassar sudah cukup baik atau efektif. Namun hendaklah keefektivan pemungutan tersebut dapat ditingkatkan agar tujuan dari organisasi yaitu meningkatkan penerimaan pajak dapat terpenuhi. Sementara untuk mengukur efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu dengan melihat tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur melalui aspek yuridis yang terdiri dari pendaftaran WP, pelaporan SPT, penghitungan pajak dan pembayaran pajak.

Putra dan Wirawati (2015) yang berjudul Pernilaian Kinerja Berbasis *Value for Money* atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2013 berdasarkan variabel ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan jika dilihat dari kriteria ekonomi tahun anggaran 2010 sampai tahun 2013 mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan dikategorikan sangat ekonomis karena tingkat rasio ekonominya berada di atas 100%. Ditinjau dari sudut efisiensi untuk Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2010 sampai tahun 2013 dikategorikan sangat efisien karena rasio efisiensinya kurang dari 60%. Ditinjau dari sudut efektivitasnya kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan untuk Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 sampai tahun 2013 mengalami fluktuasi namun masih dikategorikan sangat efektif karena rasio efektivitasnya diatas 100%.

Purnamasari, Dkk (2014) yang berjudul Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan *Value for Money Audit* Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan nilai untuk uang yang merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu: (1) ekonomi, (2) efisiensi, dan (3) efektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang difokuskan pada kinerja dalam memungut PAD. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dengan menggunakan metode dokumentasi selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2007-2011 secara total berada pada kategori sangat baik, akan tetapi jika dilihat dari rata-rata rasio: (1) ekonomi berada pada kriteria sangat ekonomis, (2) efisiensi berada pada kriteria cukup efisien, dan (3) efektivitas berada pada kriteria sangat efektif.

Khikmah (2014) yang berjudul Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep *Value for Money*. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan konsep *Value for Money*, yang meliputi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2009 hingga 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tidak ekonomis karena menghasilkan rasio lebih dari 100%, artinya pemerintah kurang sukses dalam mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga terjadi pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Dilihat dari efisiensi dan efektivitas, kinerja pemerintah telah efisien dan efektif. Hal ini berarti pemerintah telah mampu mengelola sumber daya keuangan daerah dengan baik dan sukses dalam menentukan target penerimaan daerah.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pajak Daerah

2.2.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Djaenuri (2012:89) Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Kurniawan dan Purwanto (2006:47) Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam Anggaran Pembinaan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib orang pribadi atau badan kepada daerah, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan imbalan secara tidak langsung dan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan daerah.

2.2.1.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak daerah yaitu:

1. Pajak provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

- d. Pajak Air Permukaan (PAP).
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
- a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran.
 - c. Pajak Hiburan.
 - d. Pajak Reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan.
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - g. Pajak Parkir.
 - h. Pajak Air Tanah.
 - i. Pajak Sarang Burung Walet.
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan.
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak memiliki lima macam fungsi (Sambodo, 2014:7) antara lain:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan masing-masing warga Negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini juga banyak ditentang karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya, tetapi orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Reguleren*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak sebagai fungsi sosial, yaitu diterapkannya tarif yang lebih tinggi terhadap beberapa

barang mewah untuk mengurangi kesenjangan sosial di kehidupan masyarakat, sedangkan pajak sebagai fungsi ekonomi, yaitu diterapkan pembebasan pajak untuk komoditi ekspor yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkatkan kegiatan dibidang perekonomian.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Fungsi Demokrasi

Merupakan salah satu penjelmaan atas wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi ini pada saat ini sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya pembayar pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan dengan baik, timbal baliknya pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik.

2.2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Djaenuri (2012:132) pemungutan pajak sebaiknya dilaksanakan dengan mendasarkan diri dari beberapa persyaratan berikut:

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus adil. Agar syarat ini dapat diterapkan maka dalam pemungutan pajak, pemerintah harus mengasumsikan bahwa setiap orang atau setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama untuk membayar pajak. Dengan demikian, pajak yang ditetapkan kemudian bersifat umum dan merata, tidak ada yang terkecualikan dari kewajiban pajak.

2. Syarat Yudiris

Pemungutan Pajak harus memiliki dasar hukum yang berupa ketentuan perundang-undangan yang dapat memberi jaminan bagi negara maupun rakyat selaku pembayar pajak. Dasar hukum dalam pemungutan pajak harus memberikan kejelasan mengenai hak-hak pemungutan pajak serta jaminan hukum dan perlindungan kepada wajib pajak.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak harus memperhatikan kemampuan ekonomi wajib pajak maupun keseimbangan perekonomian secara keseluruhan. Hal ini karena pada prinsipnya rakyat tidak boleh dengan pajak yang berat yang tidak sesuai dengan kemampuannya, hal itu karena menyulitkan kehidupan sehari-harinya.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus dapat dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan penerimaan yang sebesar-besarnya bagi negara. Pemungutan pajak harus memperhatikan perbandingan antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Tidak ada gunanya bila jumlah pajak yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan biaya untuk memungutnya.

2.2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Metra (2014) sistem pemungutan pajak daerah dibagi atas:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang menjelaskan bahwa jumlah pajak yang terutang harus dilunasi oleh wajib pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak harus aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Sistem ini merupakan sistem yang memberikan kepercayaan sepenuhnya pada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang terutang yang harus dibayar atau dilunasi oleh wajib pajak, dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak (fiskus). Aparat pajak berperan aktif menghitung dan menetapkan pajak yang terutang yang harus dilunasi wajib pajak. Pada sistem ini, wajib pajak pasif dan hanya menunggu surat ketetapan pajak dari aparat pajak dan berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut wajib pajak membayar pajak yang terutang.

3. *Withholding Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa konsultan pajak, akuntan publik, wajib potong dan wajib pungut. Pihak ketiga inilah yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya dalam penghitungan dan pengadministrasian pajak oleh aparat pajak berdasarkan undang-undang perpajakan untuk memotong sejumlah persen tertentu dari penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak. Fiskus hanya berperan apabila terdapat dugaan bahwa pihak ketiga yang diberi kewenangan tidak melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pajak dalam pemungutan pajak.

2.2.2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

2.2.2.1 Pengertian

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.2.2.2 Dasar Hukum

Siahaan (2010:555) menjelaskan dasar hukum pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan pada suatu Kabupaten/Kota adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaen/Kota yang mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan pada Kabupaten/Kota dimaksud.

2.2.2.3 Objek Pajak

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 1 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Menurut Hermansyah (2015) bumi adalah permukaan bumi tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Termasuk pengertian bangunan antara lain:

- a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.

- b. Jalan tol.
- c. Kolam renang.
- d. Pagar mewah.
- e. Tempat olah raga.
- f. Galangan kapal, dermaga.
- g. Taman mewah.
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

2.2.2.4 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Menurut Cadith, dkk (2013) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti. Dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Untuk tidak terlalu membebani Wajib Pajak dan tetap memperhatikan penerimaan negara, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya NJKP yaitu serendah rendahnya 20 % dan setinggi-tingginya 100 % dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

2.2.2.5 Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara lain:

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.

- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, dan
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga Internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.2.6 Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Hal-hal lebih lanjut mengenai Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-masing.

2.2.2.7 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Sedangkan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.2.2.8 Tarif Pajak

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0.3% (nol koma tiga persen). Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.2.2.9 Perhitungan Besaran Pokok PBB-P2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan cara menghitung besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang yaitu dengan mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, atau dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PBBP2 terutang} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

2.2.3 Pengalihan Pengelolaan PBB-P2

Pengesahan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemberian otonomi ini salah satunya berupa pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dengan pengalihan ini maka seluruh kegiatan proses pendataan, pengadministrasian, pemungutan, dan pelayanan diselenggarakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Sebelum desentralisasi PBB-P2, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapat bagian 64.8%, sedangkan setelah desentralisasi semua penerimaan masuk dalam kas daerah. Pengalihan ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tujuan pengalihan PBB-P2 antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru.

3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas pajak daerah.
4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah.
5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrument penganggaran pada daerah.

Dampak pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menurut Ramadhan (2014) antara lain:

1. Dampak Positif

- a. Akurasi data objek dan subjek PBB-P2 dapat lebih ditingkatkan karena aparat pemerintah daerah lebih menguasai wilayahnya apabila dibandingkan dengan aparat pemerintah pusat sehingga dapat meminimalisir pengajuan keberatan dari para wajib pajak PBB-P2.
- b. Daerah memiliki kemampuan meningkatkan potensi PBB-P2 sepanjang penentuan NJOP selama ini oleh pemerintah pusat dinilai masih dibawah nilai pasar objek yang bersangkutan.
- c. Pemberdayaan *local taxing power*, yaitu kewenangan penuh daerah dalam tarif dan pengelolaan administrasi pemungutan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

2. Dampak Negatif

- a. Dalam rangka pengelolaan PBB-P2 pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk penambahan kantor dan pegawai baru maupun untuk melengkapi peralatan administrasi, komputerisasi dan pelatihan SDM.
- b. Pendaerahan PBB-P2 mengakibatkan beragamnya kebijakan antar daerah, missal pada tarif, NJOPTKP dan NPOPTKP. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi wajib pajak.
- c. Kesenjangan penerimaan PBB-P2 antar daerah akan menonjol karena disparitas potensi penerimaan pajak daerah lainnya.

2.2.4 Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Menurut Mahsun (2009) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang terutang dalam strategis planning suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai kesuksesan suatu organisasi, program, atau kegiatan (Mahmudi: 2015).

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer mencapai suatu strategi finansial maupun non-finansial. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (Mardiasmo, 2009:121). Dengan mengukur kinerja, organisasi dapat mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, memperbaiki kinerja periode berikutnya, memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*, memotivasi pegawai, dan menciptakan akuntabilitas publik (Sari, 2016).

Menurut Mardiasmo (2009:122) secara umum tujuan sistem pengukuran kinerja antara lain:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi lebih baik.
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *good congruence*, dan
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

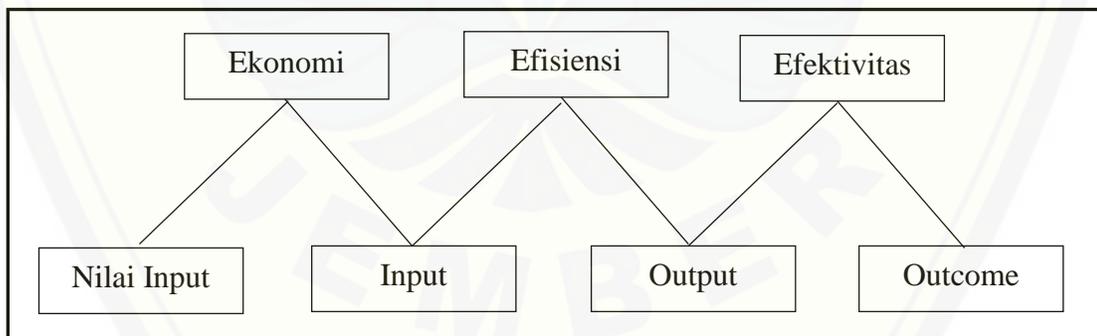
2.2.5 Value for Money

2.2.5.1 Pengertian

Value for Money menurut Mardiasmo (2009:4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

1. Ekonomi: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter.
2. Efisiensi: pencapaian output yang maksimum dengan *input* tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan output.

Secara skematis konsep *Value for Money* disajikan pada gambar 2.1 berikut.



Sumber: Mardiasmo (2009:5)

Gambar 2.1 Konsep *Value for Money*

Tingkat input, output, dan outcome harus diketahui terlebih dahulu agar dapat mengukur ekonomi, efisien dan efektivitas pada penilaian kinerja berdasarkan *Value for Money*. Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Ukuran Output menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas. Sedangkan outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan (*objectives*) atau target yang dikehendaki.

Value for Money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Implementasi konsep *Value for Money* pada organisasi sektor publik gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan *good governance*. Implementasi konsep *Value for Money* dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik (Mardiasmo, 2009).

2.2.5.2 Manfaat

Manfaat implementasi konsep *Value for Money* pada organisasi sektor publik antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, dan
5. Meningkatkan kesadaran uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

2.2.5.3 Langkah Pengukuran

Langkah - langkah pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dalam penerimaan pajak daerah dengan *Value for Money* adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran Ekonomi

Ekonomis adalah praktik pembelian dengan tingkat kualitas harga terbaik yang dimungkinkan. Pengertian ekonomi sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan data-data target biaya dan realisasi biaya. Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat ekonomis pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah rasio ekonomis, dimana rasio ekonomis merupakan perbandingan antara target biaya operasional pemungutan dengan realisasi biaya operasional pemungutan.

2. Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya serendah-rendahnya. Rasio efisiensi membandingkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Menurut Mardiasmo (2009:134) rasio efisiensi tidak dinyatakan secara absolut tetapi dalam bentuk relatif karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara berikut:

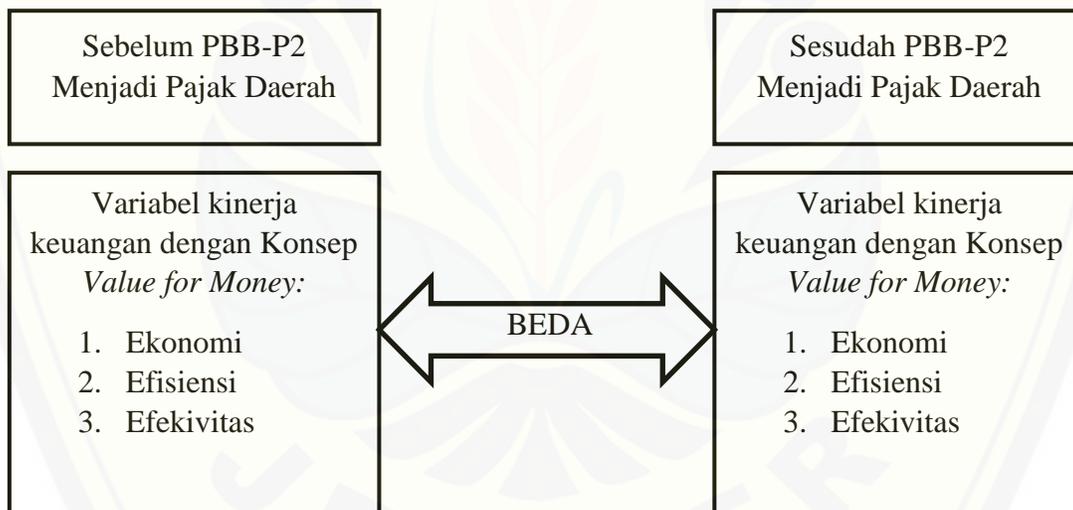
1. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama.
2. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar dari pada proporsi peningkatan input.
3. Menurunkan input pada tingkat output yang sama.

4. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.

3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu rasio efektivitas. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan target penerimaannya.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Kinerja Dinas Pendapatan berdasarkan Elemen Ekonomi

Perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi

sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu menghindari pengeluaran yang boros atau tidak produktif (Mardiasmo, 2009:4).

Pengertian ekonomi sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemorosan. Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan data-data anggaran biaya dan realisasi biaya. Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat ekonomis pada kinerja penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah rasio ekonomiyang merupakan perbandingan antara realisasi biaya dengan anggaran biaya yang ditetapkan.

Pengukuran berdasarkan elemen ekonomi dilakukan untuk mengetahui kehematan Dinas Pendapatan dalam pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).Semakin tinggi tingkat ekonomi maka semakin baik kinerja Dinas Pendapatan dalam pemungutan PBB-P2. Dengan pengukuran berdasarkan elemen ekonomi ini maka dapat ditelusuri perbandingan penggunaan biaya untuk pemungutan PBB-P2 sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H_{a1} : terdapat perbedaan nilai ekonomi terhadap kinerja sebelum dan sesudah PBB-P2 menjadi pajak daerah.

2.4.2 Kinerja Dinas Pendapatan berdasarkan Elemen Efisiensi

Pencapaian output yang maksimal dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan ouput atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditentukan (Mardiasmo, 2009:4). Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja dapa dicapai dengan penggunaan sumber daya serendah-rendahnya.

Rasio efisiensi membandingkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan hasil realisasinya.

Pengukuran kinerja Dinas Pendapatan dalam pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan elemen efisiensi dilakukan untuk mengetahui pencapaian Dinas Pendapatan dalam pemungutan PBB-P2. Semakin kecil tingkat efisiensi maka semakin baik kinerja Dinas Pendapatan dalam penerimaan PBB-P2. Dengan pengukuran berdasarkan elemen efisiensi ini maka dapat ditelusuri perbandingan penggunaan biaya untuk ketercapaian realisasi penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sari (2015) yang berjudul Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi Kabupaten Jember sebesar 9% sebelum menjadi pajak daerah, dan menjadi 4.89% setelah menjadi pajak daerah yang menunjukkan kriteria sangat efisien, hal ini menunjukkan adanya perubahan tingkat efisiensi PBB-P2 Kabupaten Jember.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H_{a2} : terdapat perbedaan nilai efisiensi terhadap kinerja sebelum dan sesudah PBB-P2 menjadi pajak daerah.

2.4.3 Kinerja Dinas Pendapatan berdasarkan Elemen Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu rasio efektivitas. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan target atau anggarannya.

Pengukuran kinerja Dinas Pendapatan Daerah dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan elemen efektivitas dilakukan untuk mengetahui pencapaian target yang dilakukan dalam penerimaan PBB-P2. Pengukuran tingkat efektivitas ini dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi penerimaan PBB-P2. Semakin tinggi tingkat efektivitas maka semakin baik kinerja Dinas Pendapatan dalam PBB-P2. Dengan pengukuran berdasarkan elemen efektivitas ini maka dapat ditelusuri perbandingan realisasi dan target penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rahmatika (2015) yang berjudul Studi Komparatif Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pada Kabupaten Kediri. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB kabupaten Kediri saat menjadi pajak pusat dan dikelola oleh DJP lebih baik daripada saat dikelola oleh pemerintah daerah. Tingkat efektivitas rata-rata sebelum pendaerahan PBB sebesar 112,955% dan tingkat efektifitas rata-rata setelah pendaerahan PBB sebesar 104,935% dengan kriteria sama, yaitu sangat efektif.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H_{a3} : terdapat perbedaan nilai efektivitas terhadap kinerja sebelum dan sesudah PBB-P2 menjadi pajak daerah.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Salah satu syarat keberhasilan suatu penelitian adalah apabila didukung oleh penelitian yang lengkap. Keberhasilan dalam pengumpulan data sangat tergantung pada metode yang digunakan sehingga data yang dihasilkan berupa data yang objektif dan lengkap sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang diselesaikan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

3.1 Objek dan Jenis Penelitian

Objek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember yang terletak di Jalan Jawa Nomor 72 Sumbersari Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kombinasi (*mix method*). Penelitian metode kombinasi secara formal didefinisikan sebagai kelas penelitian yang menuntut peneliti untuk mencampur atau menggabungkan teknik penelitian, metode, pendekatan, konsep, atau bahasa kuantitatif dan kualitatif ke dalam studi tunggal (Elrifi, 2014).

Menurut Indriantoro dan Supomo (2011:12) penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variable-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik, sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realita. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif sehingga peneliti dapat membandingkan fenomena-fenomena tertentu dan dapat dikatakan studi komparatif.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2002). Populasi dalam

penelitian ini adalah data target dan realisasi penerimaan PBB-P2, target dan realisasi biaya operasional pemungutan PBB-P2 seluruh kecamatan di Kabupaten Jember.

Sampel adalah sebagian dari elemen-elemen populasi (Indriantoro dan Supomo, 2002). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel secara tidak acak. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah data target dan realisasi penerimaan PBB-P2, target dan realisasi biaya operasional pemungutan PBB-P2 kecamatan di Kabupaten Jember yang terdapat di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber tanpa media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2002:147). Sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara dengan sekretaris dan kasie penagihan PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 2002:147). Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data target dan realisasi biaya operasional pemungutan PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2010 - 2015, dan laporan target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2010-2015.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Studi Pustaka

Pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan mengkaji buku-buku atau literatur dan jurnal ilmiah untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat dan menyeluruh tentang mengukur kinerja pemerintah daerah dengan prinsip *Value for Money*.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2011:152). Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Sekretaris dan Kasie Penagihan PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data, dokumen-dokumen, atau catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data anggaran biaya pemungutan dan realisasi biaya pemungutan PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2010-2015, dan laporan target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2010-2015.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian kombinasi ini dilakukan dengan pertama dengan mengumpulkan data kualitatif kemudian disertai pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah proses transformasi data penelitian sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan dengan tujuan memberikan informasi mengenai karakteristik variable penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2011:170). Prosedur analisis data penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif pada penelitian ini dilakukan antara lain:

- a. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum profil Kabupaten Jember dan profil Dinas Pendapatan Kabupaten Jember melalui studi pustaka.

- b. Mengumpulkan informasi mengenai kesiapan pengalihan pengelolaan PBB-P2, faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dengan metode wawancara dengan tahapan antara lain:
1. Tahap pengumpulan data melalui instrumen pengumpulan data, dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah daftar pertanyaan yang diajukan, alat perekam dan kamera.
 2. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian instrument pengumpulan data.
 3. Tahap horizonliting, yaitu menyamakan pernyataan yang memiliki nilai yang sama sehingga pernyataan yang tidak relevan akan dihilangkan.
 4. Tahap reduksi data, yaitu dengan memilah, memusatkan dan menyederhanakan data.
 5. Tahap penyajian data, dengan merangkai data menjadi suatu kesatuan agar dapat dirumuskan kesimpulan.

2. Pendekatan kuantitatif

Pendekatan kuantitatif pada penelitian ini dilakukan antara lain:

- a. Menyajikan data penelitian yang meliputi data target dan realisasi biaya operasional pemungutan PBB-P2, data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2010-2015.
- b. Mengukur masing-masing elemen dengan teknik statistik sebagai berikut:

Rasio Ekonomi

- 1) Menyiapkan data data target dan realisasi Biaya Operasional Pemungutan (BOP) PBB-P2.
- 2) Menghitung rasio ekonomi seluruh sampel dengan Ms. Excel 2013 menggunakan formulasi rasio ekonomi (Putra Dan Wirawati, 2015) sebagai berikut:

$$\text{Rasio ekonomi} = \frac{\text{Target BOP PBBP2}}{\text{Realisasi BOP PBBP2}} \times 100\%$$

- 3) Menentukan kriteria dan simbol warna data berdasarkan rasio ekonomi dengan ketentuan berikut:

3.1 Tabel Kriteria Ekonomis Kinerja Keuangan

Persentase kinerja keuangan	Kriteria	Simbol Warna
Lebih dari 100%	Sangat ekonomis	Yellow
90 - 100%	Ekonomis	Green
80 - 89%	Cukup ekonomis	Blue
60 – 79%	Kurang ekonomis	Orange
Kurang dari 60%	Tidak ekonomis	Purple

Sumber : Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996 (diolah)

- 4) Menentukan tingkat ekonomi kinerja Kabupaten Jember berdasarkan nominal rata – rata jumlah target dan realisasi BOP, kriteria kinerja, dan kenaikan atau penurunan PBB-P2 Kabupaten Jember sebelum pengalihan pengelolaan yaitu tahun 2010 – 2012 dan setelah pengalihan pengelolaan yaitu tahun 2013 – 2015 dengan Ms. Excel 2013.

Pengukuran Efisiensi

- 1) Menyiapkan data data target BOP dan realisasi penerimaan PBB-P2.
- 2) Menghitung rasio efisiensi seluruh sampel dengan Ms. Excel 2013 menggunakan formulasi rasio efisiensi (Halim, 2004:152) sebagai berikut :

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi BOP PBBP2}}{\text{Realisasi penerimaan PBBP2}} \times 100\%$$

- 3) Menentukan kriteria dan simbol warna data berdasarkan rasio efisiensi dengan ketentuan berikut:

Tabel 3.2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase kinerja keuangan	Kriteria	Simbol warna
Lebih dari 100%	Tidak efisien	
90 - 100%	Kurang efisien	
80 - 89%	Cukup efisien	
60 – 79%	Efisien	
Kurang dari 60%	Sangat efisien	

Sumber : Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996 (diolah)

- 4) Menentukan tingkat efisiensi kinerja Kabupaten Jember berdasarkan nominal rata – rata jumlah realisasi BOP dan realisasi penerimaan, kriteria kinerja, dan kenaikan atau penurunan PBB-P2 Kabupaten Jember sebelum pengalihan pengelolaan yaitu tahun 2010 – 2012 dan setelah pengalihan pengelolaan yaitu tahun 2013 – 2015 dengan Ms. Excel 2013.

Pengukuran Efektivitas

- 1) Menyiapkan data data target dan realisasi penerimaan PBB-P2.
- 2) Menghitung rasio efektivitas seluruh sampel dengan Ms. Excel 2013 menggunakan formulasi efektivitas (Halim, 2004:152) sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBBP2}}{\text{Target Penerimaan PBBP2}} \times 100\%$$

- 3) Menentukan kriteria dan simbol warna data berdasarkan rasio efisiensi dengan ketentuan berikut:

Tabel 3.3 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase kinerja keuangan	Kriteria	Simbol Warna
Lebih dari 100%	Sangat efektif	Yellow
90 - 100%	Efektif	Green
80 - 89%	Cukup efektif	Blue
60 – 79%	Kurang efektif	Orange
Kurang dari 60%	Tidak efektif	Purple

Sumber : Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996

- 4) Menentukan tingkat efektivitas kinerja Kabupaten Jember berdasarkan nominal rata – rata jumlah target penerimaan dan realisasi penerimaan, kriteria kinerja, dan kenaikan atau penurunan PBB-P2 Kabupaten Jember sebelum pengalihan pengelolaan yaitu tahun 2010 – 2012 dan setelah pengalihan pengelolaan yaitu tahun 2013 – 2015 dengan Ms. Excel 2013.
- c. Mengolah data dengan SPSS atau *Statistical Product and Service Solution* versi 21 untuk melakukan uji statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji hipotesis dengan menggunakan data rasio ekonomi. Efisiensi, dan efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember.

3.6 Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan dengan tujuan menguji kepercayaan terhadap data hasil dari suatu penelitian yang berkaitan dengan metode kuantitatif. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu:

1. Triangulasi

Metode triangulasi adalah metode yang mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan dengan data hasil pengamatan, hasil wawancara dari informan yang lain, dan dengan menyelaraskan antara data yang diperoleh dengan kondisi sesungguhnya (Sugiono, 2010:125).

2. *Member Check*

Member check merupakan proses pengecekan data yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek atau narasumber. Hal ini bertujuan mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber. Selain itu tujuan *member check* adalah agar responden dapat memberikan informasi baru atau responden dan pembimbing dapat menyetujui kebenaran dari narasumber sehingga penelitian dapat lebih dipercaya (Usman, 2009:81)

3.7 Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menguji kenormalan distribusi data untuk menghindari bias dan atau mengetahui apakah data yang dijadikan sampel berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2001). Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Sampel penelitian berdistribusi normal apabila nilai *asymptotic sig* > tingkat keyakinan yang digunakan dalam pengujian, dalam hal ini adalah 95% atau $\alpha = 5\%$. Sebaliknya dikatakan tidak normal apabila nilai *asymptotic sig* < tingkat keyakinan.

3.8 Uji Hipotesis

Menurut Ghozali (2001) beberapa kemungkinan pilihan alat uji statistic atas hasil penelitian setelah dilakukan uji normalitas adalah:

- a. Jika hasil pengujian normalitas data menghasilkan suatu penyebaran yang normal dari rasio-rasio penilaian dengan konsep *Value for Money* maka terhadap rasio tersebut digunakan uji beda *Paired Sample T Test*. Dengan pengukuran hipotesis sebagai berikut:

Jika probabilitas > 0.05 maka H_a ditolak

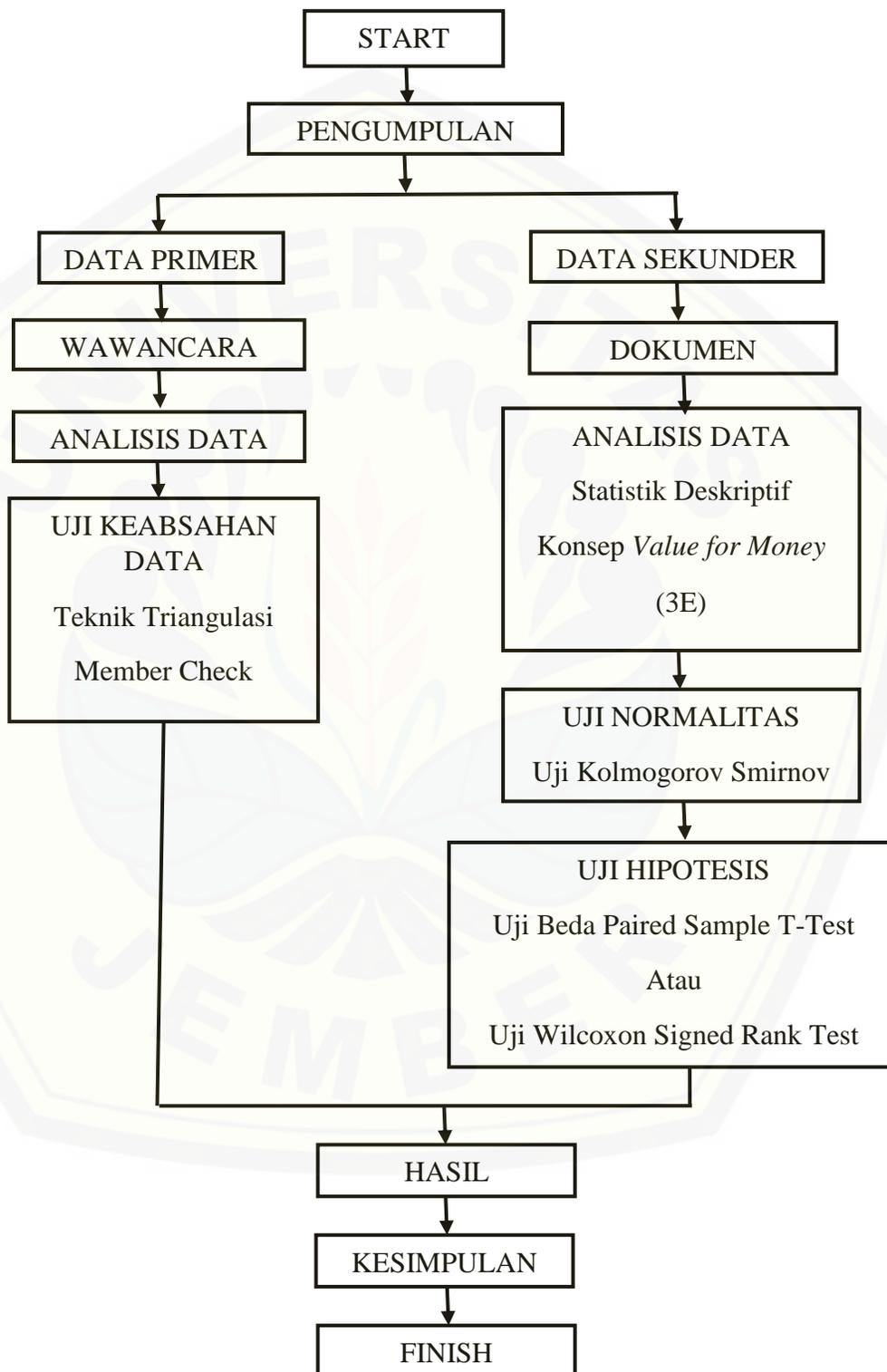
Jika probabilitas ≤ 0.05 maka H_a diterima

- b. Jika hasil pengujian normalitas data menghasilkan suatu penyebaran yang tidak normal dari rasio-rasio penilaian dengan konsep *Value for Money* maka terhadap rasio tersebut digunakan uji beda *Wilcoxon Sign Rank Test*. Dengan pengukuran hipotesis sebagai berikut:

H_a ditolak jika : $T \text{ hitung} > T \text{ Tabel}$

H_a diterima jika : $T \text{ hitung} \leq T \text{ Tabel}$

3.9 Kerangka Pemecahan Masalah



BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan pengalihan pengelolaan PBB-P2 Kabupaten Jember, faktor pendukung dan faktor penghambat pengalihan pengelolaan perbedaan PBB-P2 Kabupaten Jember, kinerja Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah dengan konsep *Value for Money*, adapun kesimpulan dari penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan persiapan yang diawali dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Jember, namun SOP yang berkaitan dengan PBB P2 masih belum disahkan. Jumlah karyawan untuk pengelolaan PBB-P2 berjumlah 37 karyawan dan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember melakukan upaya untuk mengembangkan kompetensi SDM. Untuk sarana dan prasarana seperti fasilitas perkantoran, perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan secara bertahap terpenuhi. Dinas Pendapatan juga melakukan kerjasama dan sosialisasi guna mendukung keberhasilan pengalihan pengelolaan PBB-P2.
2. Faktor pendukung proses peralihan PBB-P2 di Kabupaten Jember antara lain tersedianya pembiayaan dan kerjasama pihak KPP Pratama Jember dan SKPD terkait. Sedangkan faktor penghambat antara lain terbatasnya SDM yang berkompetensi, kurangnya kesadaran masyarakat dan kecurangan yang dilakukan aparat pemungut.

3. Berdasarkan hasil analisis data *Wilcoxon Signed Rank Test* rasio ekonomi menunjukkan nilai 0.000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikan yang telah ditetapkan ($\alpha = 0.05$), maka terdapat perbedaan tingkat ekonomi sebelum dan sesudah PBB-P2 menjadi pajak daerah. Tingkat ekonomi kinerja penerimaan PBB-P2 sebelum menjadi pajak daerah sebesar 156% dan sesudah menjadi pajak daerah sebesar 219%, hal ini menunjukkan secara ekonomi kinerja Pemerintah Kabupaten Jember setelah pengalihan PBB-P2 meningkat dengan kategori sangat ekonomis.
4. Berdasarkan hasil analisis data *Wilcoxon Signed Rank Test* rasio efisiensi menunjukkan nilai 0.000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikan yang telah ditetapkan ($\alpha = 0.05$), maka terdapat perbedaan tingkat efisiensi sebelum dan sesudah PBB-P2 menjadi pajak daerah. Tingkat efisiensi kinerja penerimaan PBB-P2 sebelum menjadi pajak daerah sebesar 9% dan sesudah menjadi pajak daerah sebesar 3.3%, hal ini menunjukkan secara efisiensi kinerja Pemerintah Kabupaten Jember setelah pengalihan PBB-P2 meningkat dengan kategori sangat efisien.
5. Berdasarkan hasil analisis data *Wilcoxon Signed Rank Test* rasio efektivitas menunjukkan nilai 0.001 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikan yang telah ditetapkan ($\alpha = 0.05$), maka terdapat perbedaan tingkat efektivitas sebelum dan sesudah PBB-P2 menjadi pajak daerah. Tingkat efektivitas kinerja penerimaan PBB-P2 sebelum menjadi pajak daerah sebesar 64% dan sesudah menjadi pajak daerah sebesar 71%, hal ini menunjukkan secara efektivitas kinerja Pemerintah Kabupaten Jember setelah pengalihan PBB-P2 meningkat dengan kategori kurang efektif.

5.2 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya mengukur kinerja secara finansial dalam pemungutan PBB-P2
2. Penelitian ini hanya terfokus pada satu daerah.
3. Rentan waktu perbandingan yang pendek memungkinkan terjadinya perbedaan hasil penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian adapun saran-saran dari peneliti antara lain:

1. Bagi objek penelitian yaitu Dinas Pendapatan Kabupaten Jember perlu dilakukan peningkatan agar dapat meningkatkan kinerja secara efektif, seperti meningkatkan pengawasan terhadap kinerja petugas pemungut PBB-P2, menambah atau mengganti petugas dengan yang lebih berkompeten, dan pemberian tanggal jatuh tempo yang tegas kepada masyarakat untuk membayar PBB-P2.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian misal melakukan perbandingan kinerja pemungutan PBB-P2 se Jawa Timur atau se Indonesia, melakukan pengukuran tidak hanya secara finansial melainkan juga secara nonfinansial. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan konsep *Best Value* menambah variabel *equity* (keadilan) dan *equality* (kesetaraan).

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, Demi Aulia. 2014. "Analisis Value for Money dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2012". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bolowantu, Novita. 2015. "Analisis Perbandingan Penerimaan Sebelum dan Sesudah Desentralisasi PBB menjadi PBB-P2 pada Pemerintah Kota Gorontalo". Skripsi. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Cadith, J., Haris, D. M., dan Burhanuddin. 2013. Analisis Peralihan Pajak PBBP2 dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah di Kota Serang. *E-Jurnal Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*. Vol. 7 (1):6-12.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2014. *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
- Djaenuri, H. M. A. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Elrifi, Yudhika. 2014. Pengaruh Konflik Keharusan Akuntabilitas terhadap Kinerja Kerja NGO di Indonesia. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana*.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hermansyah, A. A. 2015. "Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Dispenda Kota Makasar". Skripsi. Makassar: Universitas Hassanudin.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPF.

- Khikmah, Alayyal. 2014. "Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep Value for Money". Skripsi. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Kurniawan, Panca dan Purwanto, Agus. 2006. *Pajak Daerah Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Muhammad. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFU UGM.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Metra, Wahid. 2015. "Analisis Kinerja Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Timur". Dalam <http://wahidmetra.blogspot.com/201501/analisis-kinerja-penerimaan-pajak-dan.html?m=1>. [19 februari 2016].
- Mustafa, Bob dan Halim, Abdul. 2009. Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Vol. 7 (4): 792-802.
- Napitulu, L. S. & Budiarmo, Novi. 2015. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah terhadap Pencatatan Akuntansi pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 3 (1): 358-473.
- Purnamasari, I. D., Suwendra, Wayan., Cipta, Wayan. 2014. Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value for Money Audit atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2007-2011. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*. Vol. 2.
- Putra, A. P. A. & Wirawati, N. G. P. 2015. Penilaian Kinerja Berbasis Value for Money atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol. 11(1): 252-268.
- Ramadhan, Jogi Fahrival. Pengaruh Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah terhadap Realisasi Penerimaannya di Kota Surabaya. *Jurnal Akunesa*. Vol. 2.

- Ratuela, G. B., Nangoi, G. B., dan Sambijon, Harjiyanto. 2015. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 15 (5): 155-166.
- Sambodo, Agus. 2014. *Pajak dalam Entitas Bisnis*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sari, Kinanti Amalia. 2016. “Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah”. Tidak diterbitkan. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Siahaan, P. MARIHOT. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Usman, Husaini dan Akbar, P. S. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 1996. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327. tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- _____. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

LAMPIRAN 1. Daftar Sampel

No.	Nama Kecamatan	No.	Nama Kecamatan
1	Ajung	17	Panti
2	Ambulu	18	Patrang
3	Arjasa	19	Puger
4	Balung	20	Rambipuji
5	Bangsalsari	21	Semboro
6	Gumukmas	22	Silo
7	Jelbuk	23	Sukorambi
8	Jenggawah	24	Sukowono
9	Jombang	25	Sumberbaru
10	Kalisat	26	Sumberjambe
11	Kaliwates	27	Sumbersari
12	Kencong	28	Tanggul
13	Ledokombo	29	Tempurejo
14	Mayang	30	Umbulsari
15	Mumbulsari	31	Wuluhan
16	Pakusari		

**LAMPIRAN 2. Daftar Target dan Realisasi BOP PBB Perkotaan dan Perdesaan
Kabupaten Jember 2010-2015**

**DAFTAR TARGET DAN REALISASI BOP PBB SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN TAHUN 2010
KABUPATEN JEMBER
S/D TANGGAL 26 SEPTEMBER 2013**

Jam : 07.00 WIB

NO	KECAMATAN	TARGET	REALISASI	%	SISA	KETERANGAN
1	Ambulu	Rp 85,760,874	Rp 85,251,488	99%	Rp 509,386	
2	Semboro	Rp 39,170,136	Rp 36,044,717	92%	Rp 3,125,420	
3	Balung	Rp 77,338,467	Rp 70,751,001	91%	Rp 6,587,466	
4	Gumukmas	Rp 70,335,385	Rp 59,880,632	85%	Rp 10,454,752	
5	Umbulsari	Rp 102,061,192	Rp 86,795,660	85%	Rp 15,265,532	
6	Rambipuji	Rp 67,832,862	Rp 54,323,719	80%	Rp 13,509,142	
7	Jombang	Rp 54,295,346	Rp 41,819,556	77%	Rp 12,475,790	
8	Silo	Rp 35,579,362	Rp 26,989,639	76%	Rp 8,589,723	
9	Kencong	Rp 62,389,033	Rp 45,746,311	73%	Rp 16,642,722	
10	Tanggul	Rp 48,159,739	Rp 35,023,545	73%	Rp 13,136,194	
11	Bangsalsari	Rp 66,779,208	Rp 48,289,092	72%	Rp 18,490,117	
12	Ledokombo	Rp 35,148,520	Rp 24,348,085	69%	Rp 10,800,435	
13	Sumberbaru	Rp 52,673,673	Rp 36,140,072	69%	Rp 16,533,600	
14	Tempurejo	Rp 27,722,232	Rp 18,874,016	68%	Rp 8,848,216	
15	Sukowono	Rp 33,521,716	Rp 22,774,427	68%	Rp 10,747,288	
16	Jenggawah	Rp 66,281,948	Rp 44,812,403	68%	Rp 21,469,545	
17	Jelbuk	Rp 20,314,076	Rp 13,532,702	67%	Rp 6,781,374	
18	Wuluhan	Rp 89,821,872	Rp 57,754,234	64%	Rp 32,067,638	
19	Sumberjambe	Rp 39,221,797	Rp 24,611,571	63%	Rp 14,610,226	
20	Panti	Rp 40,052,293	Rp 22,240,451	56%	Rp 17,811,842	
21	Kaliwates	Rp 389,380,764	Rp 214,148,225	55%	Rp 175,232,539	
22	Ajung	Rp 58,371,440	Rp 31,394,915	54%	Rp 26,976,525	
23	Patrang	Rp 143,270,321	Rp 71,009,613	50%	Rp 72,260,708	
24	Sumbersari	Rp 251,258,560	Rp 120,800,954	48%	Rp 130,457,607	
25	Pakusari	Rp 36,908,780	Rp 17,344,263	47%	Rp 19,564,517	
26	Sukorambi	Rp 32,070,652	Rp 14,398,236	45%	Rp 17,672,416	
27	Puger	Rp 104,127,383	Rp 44,006,161	42%	Rp 60,121,222	
28	Mayang	Rp 37,879,822	Rp 14,106,476	37%	Rp 23,773,346	
29	Kalisat	Rp 45,516,717	Rp 16,858,790	37%	Rp 28,657,927	
30	Arjasa	Rp 26,193,898	Rp 7,306,713	28%	Rp 18,887,185	
31	Mumbulsari	Rp 33,747,398	Rp 6,796,454	20%	Rp 26,950,944	
	JUMLAH					

Jember, 27 September 2012

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER

Drs. SUPRPTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610721 198603 1 011

DAFTAR TARGET DAN REALISASI BOP PBB SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN TAHUN 2011
KABUPATEN JEMBER

S/D TANGGAL 26 SEPTEMBER 2013

NO	KECAMATAN	TARGET	REALISASI	%	SISA	KETERANGAN
1	Ambulu	Rp 85,329,403	Rp 85,329,412	100%	Rp (9)	
2	Semboro	Rp 39,206,294	Rp 36,255,928	92%	Rp 2,950,366	
3	Umbulsari	Rp 102,061,582	Rp 93,288,345	91%	Rp 8,773,237	
4	Gumukmas	Rp 70,391,416	Rp 62,366,896	89%	Rp 8,024,520	
5	Rambipuji	Rp 67,471,986	Rp 56,362,986	84%	Rp 11,108,999	
6	Tanggul	Rp 48,127,086	Rp 39,426,953	82%	Rp 8,700,132	
7	Kencong	Rp 62,748,469	Rp 51,023,954	81%	Rp 11,724,515	
8	Balung	Rp 76,958,276	Rp 62,220,246	81%	Rp 14,738,030	
9	Jombang	Rp 54,099,267	Rp 41,941,424	78%	Rp 12,157,843	
10	Silo	Rp 35,240,595	Rp 27,129,470	77%	Rp 8,111,125	
11	Bangsalsari	Rp 66,724,644	Rp 50,499,388	76%	Rp 16,225,256	
12	Tempurejo	Rp 27,737,277	Rp 20,696,135	75%	Rp 7,041,143	
13	Jelbuk	Rp 20,040,656	Rp 14,082,437	70%	Rp 5,958,220	
14	Sumberbaru	Rp 51,703,321	Rp 36,244,183	70%	Rp 15,459,138	
15	Sumberjambe	Rp 39,204,177	Rp 26,857,999	69%	Rp 12,346,178	
16	Ledokombo	Rp 35,062,254	Rp 22,787,375	65%	Rp 12,274,879	
17	Jenggawah	Rp 74,458,239	Rp 47,884,908	64%	Rp 26,573,331	
18	Wuluhan	Rp 89,611,525	Rp 57,591,814	64%	Rp 32,019,712	
19	Sukowono	Rp 33,668,895	Rp 20,024,217	59%	Rp 13,644,678	
20	Kaliwates	Rp 399,685,780	Rp 235,411,387	59%	Rp 164,274,393	
21	Puger	Rp 103,854,406	Rp 55,468,355	53%	Rp 48,386,051	
22	Patrang	Rp 143,434,753	Rp 76,280,103	53%	Rp 67,154,650	
23	Panti	Rp 39,917,792	Rp 21,046,938	53%	Rp 18,870,854	
24	Pakusari	Rp 40,126,444	Rp 20,923,280	52%	Rp 19,203,164	
25	Mayang	Rp 38,099,652	Rp 19,053,283	50%	Rp 19,046,369	
26	Sumbersari	Rp 253,406,540	Rp 121,221,812	48%	Rp 132,184,728	
27	Sukorambi	Rp 33,748,469	Rp 16,079,244	48%	Rp 17,669,224	
28	Kalisat	Rp 45,643,862	Rp 21,447,301	47%	Rp 24,196,561	
29	Ajung	Rp 70,152,852	Rp 32,339,460	46%	Rp 37,813,393	
30	Mumbulsari	Rp 33,914,787	Rp 14,938,290	44%	Rp 18,976,496	
31	Arjasa	Rp 26,200,192	Rp 8,920,147	34%	Rp 17,280,044	

Jember, 26 September 2013

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER

Drs. SUPRPTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610721 198603 1 011

DAFTAR TARGET DAN REALISASI BOP PBB SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN TAHUN 2012
KABUPATEN JEMBER
S/D TANGGAL 31 DESEMBER 2013

NO	KECAMATAN	TARGET	REALISASI	%	SISA	KETERANGAN
1	Ambulu	Rp 85,087,585	Rp 85,170,633	100%	Rp (83,048)	
2	Semboro	Rp 39,199,775	Rp 36,601,800	93%	Rp 2,597,975	
3	Kencong	Rp 62,708,271	Rp 53,305,961	85%	Rp 9,402,310	
4	Umbulsari	Rp 102,347,312	Rp 86,337,481	84%	Rp 16,009,831	
5	Gumukmas	Rp 70,790,989	Rp 58,089,913	82%	Rp 12,701,076	
6	Balung	Rp 76,578,415	Rp 62,780,055	82%	Rp 13,798,360	
7	Bangsalsari	Rp 67,628,360	Rp 54,468,359	81%	Rp 13,160,001	
8	Tanggul	Rp 48,065,774	Rp 37,564,976	78%	Rp 10,500,797	
9	Jombang	Rp 54,028,247	Rp 41,303,543	76%	Rp 12,724,705	
10	Silo	Rp 36,187,436	Rp 27,286,925	75%	Rp 8,900,511	
11	Rambipuji	Rp 67,607,931	Rp 49,797,068	74%	Rp 17,810,863	
12	Tempurejo	Rp 27,799,580	Rp 19,829,891	71%	Rp 7,969,689	
13	Kaliwates	Rp 406,849,647	Rp 283,098,301	70%	Rp 123,751,346	
14	Sumberjambe	Rp 39,241,098	Rp 26,996,440	69%	Rp 12,244,658	
15	Ledokombo	Rp 35,055,664	Rp 23,916,001	68%	Rp 11,139,663	
16	Sumberbaru	Rp 51,386,866	Rp 33,871,477	66%	Rp 17,515,389	
17	Sukorambi	Rp 33,458,075	Rp 21,670,816	65%	Rp 11,787,259	
18	Sukowono	Rp 33,152,544	Rp 20,619,307	62%	Rp 12,533,237	
19	Panti	Rp 39,863,250	Rp 24,772,917	62%	Rp 15,090,332	
20	Wuluhan	Rp 89,595,832	Rp 52,467,550	59%	Rp 37,128,282	
21	Pakusari	Rp 40,017,528	Rp 22,115,281	55%	Rp 17,902,247	
22	Puger	Rp 103,700,823	Rp 56,758,398	55%	Rp 46,942,425	
23	Jenggawah	Rp 88,867,736	Rp 47,876,479	54%	Rp 40,991,257	
24	Sumpalsari	Rp 255,843,575	Rp 131,661,219	51%	Rp 124,182,356	
25	Ajung	Rp 69,801,950	Rp 35,449,522	51%	Rp 34,352,427	
26	Patrang	Rp 143,453,868	Rp 71,615,252	50%	Rp 71,838,616	
27	Kalisat	Rp 48,667,061	Rp 24,140,963	50%	Rp 24,526,099	
28	Mayang	Rp 38,034,579	Rp 17,911,214	47%	Rp 20,123,366	
29	Jelbuk	Rp 26,662,681	Rp 11,335,303	43%	Rp 15,327,377	
30	Arjasa	Rp 26,202,817	Rp 8,425,599	32%	Rp 17,777,219	
31	Mumbulsari	Rp 34,090,185	Rp 8,711,149	26%	Rp 25,379,036	
		Rp 2,341,975,453	Rp 1,535,949,792		Rp 806,025,661	

Jember, 6 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER

Drs. SUPRAPTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610721 198603 1 011

DAFTAR TARGET DAN REALISASI BOP PBB SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN TAHUN 2013
KABUPATEN JEMBER
S/D TANGGAL 11 MARET 2014

NO	KECAMATAN	TARGET	REALISASI	%	SISA	KETERANGAN
1	PAKUSARI	Rp 24,925,200	Rp 25,468,002	102%	Rp (542,802)	
2	SUMBERBARU	Rp 33,828,777	Rp 34,247,873	101%	Rp (419,097)	
3	BANGSALSARI	Rp 45,288,538	Rp 45,809,982	101%	Rp (521,445)	
4	TANGGUL	Rp 31,133,007	Rp 31,455,161	101%	Rp (322,154)	
5	SEMBORO	Rp 24,178,164	Rp 24,336,308	101%	Rp (158,144)	
6	JOMBANG	Rp 33,669,177	Rp 33,879,590	101%	Rp (210,413)	
7	LEDOKOMBO	Rp 24,724,798	Rp 24,824,045	100%	Rp (99,246)	
8	WULUHAN	Rp 58,685,250	Rp 58,890,946	100%	Rp (205,696)	
9	UMBULSARI	Rp 64,933,228	Rp 65,082,475	100%	Rp (149,248)	
10	BALUNG	Rp 47,145,625	Rp 47,133,609	100%	Rp 12,016	
11	AMBULLU	Rp 53,174,358	Rp 53,067,221	100%	Rp 107,136	
12	SILO	Rp 26,071,009	Rp 19,350,567	74%	Rp 6,720,442	
13	GUMUKMAS	Rp 47,766,053	Rp 34,647,374	73%	Rp 13,118,679	
14	SUKOWONO	Rp 22,441,616	Rp 16,218,864	72%	Rp 6,222,752	
15	SUKORAMBI	Rp 20,174,906	Rp 14,306,739	71%	Rp 5,868,167	
16	KENCONG	Rp 38,748,681	Rp 27,335,447	71%	Rp 11,413,233	
17	PUGER	Rp 65,304,086	Rp 44,517,593	68%	Rp 20,786,493	
18	JELBUK	Rp 17,549,666	Rp 11,937,561	68%	Rp 5,612,104	
19	RAMBIPUJI	Rp 40,858,693	Rp 27,477,558	67%	Rp 13,381,135	
20	TEMPUREJO	Rp 18,687,165	Rp 12,136,689	65%	Rp 6,550,476	
21	KALISAT	Rp 32,603,590	Rp 19,971,307	61%	Rp 12,632,283	
22	MAYANG	Rp 23,519,063	Rp 13,706,606	58%	Rp 9,812,458	
23	SUMBERJAMBE	Rp 26,801,194	Rp 15,204,940	57%	Rp 11,596,254	
24	AJUNG	Rp 42,335,049	Rp 23,974,351	57%	Rp 18,360,698	
25	ARJASA	Rp 17,111,703	Rp 6,319,977	37%	Rp 10,791,726	
26	KALIWATES	Rp 235,867,765	Rp 84,763,352	36%	Rp 151,104,413	
27	PANTI	Rp 25,914,312	Rp 9,015,148	35%	Rp 16,899,164	
28	JENGGAWAH	Rp 54,235,067	Rp 17,755,054	33%	Rp 36,480,013	
29	PATRANG	Rp 83,602,749	Rp 25,699,832	31%	Rp 57,902,917	
30	SUMBERSARI	Rp 150,145,489	Rp 41,789,230	28%	Rp 108,356,259	
31	MUMBULSARI	Rp 22,442,074	Rp 6,059,849	27%	Rp 16,382,225	

Jember, 12 Maret 2014

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER

Drs. SUPRAPTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610721 198603 1 011

DAFTAR TARGET DAN REALISASI BOP PBB SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN TAHUN 2014
KABUPATEN JEMBER
S/D TANGGAL 9 JUNI 2015

NO	KECAMATAN	TARGET	REALISASI	%	SISA	KETERANGAN
1	Ambulu	Rp 86,173,306	Rp 86,097,615	100%	Rp 75,690	
2	Balung	Rp 80,697,637	Rp 58,217,945	72%	Rp 22,479,693	
3	Wuluhan	Rp 99,414,546	Rp 71,226,906	72%	Rp 28,187,640	
4	Rambipuji	Rp 67,313,382	Rp 47,022,473	70%	Rp 20,290,909	
5	Umbulsari	Rp 113,148,980	Rp 77,890,573	69%	Rp 35,258,407	
6	Semoro	Rp 42,821,749	Rp 28,155,408	66%	Rp 14,666,342	
7	Bangsalsari	Rp 69,136,471	Rp 45,151,443	65%	Rp 23,985,028	
8	Gumukmas	Rp 86,064,736	Rp 53,566,983	62%	Rp 32,497,753	
9	Tanggul	Rp 55,117,750	Rp 34,112,460	62%	Rp 21,005,290	
10	Kencong	Rp 66,479,903	Rp 40,416,464	61%	Rp 26,063,439	
11	Sukowono	Rp 36,282,879	Rp 21,663,419	60%	Rp 14,619,460	
12	Jombang	Rp 59,036,616	Rp 34,814,075	59%	Rp 24,222,541	
13	Tempurejo	Rp 33,729,440	Rp 12,549,703	37%	Rp 21,179,737	
14	Puger	Rp 109,707,579	Rp 40,671,585	37%	Rp 69,035,994	
15	Pakusari	Rp 38,300,614	Rp 14,191,977	37%	Rp 24,108,637	
16	Kaliwates	Rp 375,197,321	Rp 137,963,915	37%	Rp 237,233,406	
17	Sumberbaru	Rp 64,965,146	Rp 23,872,246	37%	Rp 41,092,900	
18	Kalisat	Rp 54,712,016	Rp 18,870,725	34%	Rp 35,841,292	
19	Silo	Rp 53,871,730	Rp 18,527,769	34%	Rp 35,343,961	
20	Ledokombo	Rp 42,101,934	Rp 13,974,230	33%	Rp 28,127,704	
21	Sumbersari	Rp 236,711,207	Rp 72,711,312	31%	Rp 163,999,895	
22	Patrang	Rp 142,773,510	Rp 42,816,099	30%	Rp 99,957,411	
23	Ajung	Rp 71,913,081	Rp 20,001,990	28%	Rp 51,911,091	
24	Jenggawah	Rp 92,532,080	Rp 25,703,826	28%	Rp 66,828,254	
25	Sukorambi	Rp 33,502,698	Rp 9,239,815	28%	Rp 24,262,883	
26	Panti	Rp 41,815,664	Rp 11,412,281	27%	Rp 30,403,383	
27	Sumberjambe	Rp 49,073,674	Rp 7,793,772	16%	Rp 41,279,902	
28	Arjasa	Rp 29,600,639	Rp 3,236,140	11%	Rp 26,364,499	
29	Jelbuk	Rp 30,078,030	Rp 3,234,216	11%	Rp 26,843,813	
30	Mayang	Rp 37,847,593	Rp 3,320,465	9%	Rp 34,527,128	
31	Mumbulsari	Rp 39,417,907	Rp 2,427,913	6%	Rp 36,989,993	

Jember, 9 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER

Drs. SUPRPTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610721 198603 1 011

DAFTAR TARGET DAN REALISASI BOP PBB SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN TAHUN 2015
KABUPATEN JEMBER
S/D TANGGAL 31 MARET 2016

NO	KECAMATAN	TARGET	REALISASI	%	SISA	KETERANGAN
1	Ambulu	Rp 90,198,696	Rp 65,068,730	72%	Rp 25,129,966	
2	Balung	Rp 80,642,958	Rp 56,744,117	70%	Rp 23,898,841	
3	Wuluhan	Rp 99,675,915	Rp 68,406,617	69%	Rp 31,269,297	
4	Semboro	Rp 42,997,660	Rp 27,908,840	65%	Rp 15,088,820	
5	Umbulsari	Rp 113,113,330	Rp 72,032,779	64%	Rp 41,080,551	
6	Rambipuji	Rp 67,708,145	Rp 43,091,769	64%	Rp 24,616,375	
7	Kencong	Rp 67,409,656	Rp 40,308,749	60%	Rp 27,100,907	
8	Tanggul	Rp 55,566,576	Rp 31,685,216	57%	Rp 23,901,360	
9	Silo	Rp 54,187,710	Rp 19,579,410	36%	Rp 34,608,301	
10	Sumberbaru	Rp 65,128,065	Rp 22,918,028	35%	Rp 42,210,037	
11	Kaliwates	Rp 385,685,511	Rp 134,426,539	35%	Rp 251,258,972	
12	Jombang	Rp 59,047,448	Rp 19,767,315	33%	Rp 39,280,133	
13	Gumukmas	Rp 86,326,561	Rp 25,435,950	29%	Rp 60,890,611	
14	Puger	Rp 110,013,148	Rp 31,929,068	29%	Rp 78,084,080	
15	Sukowono	Rp 36,590,276	Rp 10,423,765	28%	Rp 26,166,512	
16	Bangsalsari	Rp 75,354,164	Rp 21,135,310	28%	Rp 54,218,854	
17	Sumbersari	Rp 238,342,192	Rp 66,456,222	28%	Rp 171,885,969	
18	Sukorambi	Rp 33,676,238	Rp 9,389,663	28%	Rp 24,286,576	
19	Ajung	Rp 73,147,226	Rp 20,263,940	28%	Rp 52,883,286	
20	Patrang	Rp 144,373,120	Rp 38,295,895	27%	Rp 106,077,225	
21	Pakusari	Rp 37,839,330	Rp 9,716,886	26%	Rp 28,122,444	
22	Jenggawah	Rp 92,160,615	Rp 23,391,981	25%	Rp 68,768,634	
23	Panti	Rp 44,342,176	Rp 10,849,086	24%	Rp 33,493,090	
24	Sumberjambe	Rp 49,260,254	Rp 6,552,522	13%	Rp 42,707,731	
25	Jelbuk	Rp 30,206,861	Rp 3,680,863	12%	Rp 26,525,998	
26	Tempurejo	Rp 33,734,101	Rp 3,956,748	12%	Rp 29,777,353	
27	Ledokombo	Rp 42,470,904	Rp 3,606,195	8%	Rp 38,864,709	
28	Kalisat	Rp 55,203,585	Rp 4,542,894	8%	Rp 50,660,691	
29	Arjasa	Rp 29,573,746	Rp 2,124,410	7%	Rp 27,449,336	
30	Mayang	Rp 41,185,223	Rp 2,246,250	5%	Rp 38,938,973	
31	Mumbulsari	Rp 39,837,518	Rp 1,740,759	4%	Rp 38,096,759	

Jember, 1 April 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER

Drs. SUPRPTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610721 198603 1 011

**LAMPIRAN 3. Daftar Target dan Realisasi PBB Perkotaan dan Perdesaan
Kabupaten Jember 2010-2015**

**DAFTAR REALISASI PBB SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN TAHUN 2010
KABUPATEN JEMBER
S/D TANGGAL 26 SEPTEMBER 2013**

Jam : 07.00 WIB.

NO.	KECAMATAN	BAKU	REALISASI	%	SISA	KETERANGAN
1	Ambulu	952,898,605	947,238,757	99.41	5,659,848	Lunas 30-09-2010
2	Semboro	435,223,738	400,496,853	92.02	34,726,885	
3	Balung	859,316,298	786,122,231	91.48	73,194,067	
4	Gumukmas	781,504,277	665,340,361	85.14	116,163,916	
5	Umbulsari	1,134,013,245	964,396,225	85.04	169,617,020	
6	Rambipuji	753,698,463	603,596,882	80.08	150,101,581	
7	Jombang	603,281,617	464,661,729	77.02	138,619,888	
8	Silo	395,326,242	299,884,873	75.86	95,441,369	
9	Kencong	693,211,474	508,292,344	73.32	184,919,130	
10	Tanggul	535,108,214	389,150,498	72.72	145,957,716	
11	Bangsalsari	741,991,205	536,545,464	72.31	205,445,741	
12	Ledokombo	390,539,107	270,534,278	69.27	120,004,829	
13	Sumberbaru	585,263,030	401,556,359	68.61	183,706,671	
14	Tempurejo	308,024,795	209,711,288	68.08	98,313,507	
15	Sukowono	372,463,507	253,049,193	67.94	119,414,314	
16	Jenggawah	736,466,087	497,915,592	67.61	238,550,495	
17	Jelbuk	225,711,955	150,363,360	66.62	75,348,595	
18	Wuluhan	998,020,798	641,713,709	64.30	356,307,089	
19	Sumberjambe	435,797,740	273,461,900	62.75	162,335,840	
20	Panti	445,025,480	247,116,119	55.53	197,909,361	
21	Kaliwates	4,326,452,935	2,379,424,726	55.00	1,947,028,209	
22	Ajung	648,571,553	348,832,391	53.78	299,739,162	
23	Patrang	1,591,892,460	788,995,704	49.56	802,896,756	
24	Sumbersari	2,791,761,780	1,342,232,817	48.08	1,449,528,963	
25	Pakusari	410,097,554	192,714,028	46.99	217,383,526	
26	Sukorambi	356,340,574	159,980,398	44.90	196,360,176	
27	Puger	1,156,970,926	488,957,343	42.26	668,013,583	
28	Mayang	420,886,912	156,738,626	37.24	264,148,286	
29	Kalisat	505,741,304	187,319,890	37.04	318,421,414	
30	Arjasa	291,043,311	81,185,703	27.89	209,857,608	
31	Mumbulsari	374,971,089	75,516,154	20.14	299,454,935	
	JUMLAH	25,257,616,275	15,713,045,795	62.21	9,544,570,480	

Jember, 27 September 2012

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER

Drs. SUPRAPTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610721 198603 1 011

DAFTAR REALISASI PBB SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN TAHUN 2011
KABUPATEN JEMBER
 S/D TANGGAL 26 SEPTEMBER 2013

NO.	KECAMATAN	B A K U	REALISASI	%	S I S A	KETERANGAN
1	Ambulu	948,104,477	948,104,576	100.00	(99)	Lunas, 26-10-2011
2	Semboro	435,625,484	402,843,645	92.47	32,781,839	
3	Umbulsari	1,134,017,583	1,036,537,170	91.40	97,480,413	
4	Gumukmas	782,126,842	692,965,511	88.60	89,161,331	
5	Rambipuji	749,688,730	626,255,405	83.54	123,433,325	
6	Tanggul	534,745,395	438,077,257	81.92	96,668,138	
7	Kencong	697,205,210	566,932,825	81.32	130,272,385	
8	Balung	855,091,952	691,336,062	80.85	163,755,890	
9	Jombang	601,102,967	466,015,819	77.53	135,087,148	
10	Silo	391,562,164	301,438,551	76.98	90,123,613	
11	Bangsalsari	741,384,929	561,104,312	75.68	180,280,617	
12	Tempurejo	308,191,972	229,957,050	74.61	78,234,922	
13	Jelbuk	222,673,960	156,471,517	70.27	66,202,443	
14	Sumberbaru	574,481,341	402,713,143	70.10	171,768,198	
15	Sumberjambe	435,601,966	298,422,213	68.51	137,179,753	
16	Ledokombo	389,580,595	253,193,055	64.99	136,387,540	
17	Jenggawah	827,313,764	532,054,534	64.31	295,259,230	
18	Wuluhon	995,683,613	639,909,040	64.27	355,774,573	
19	Sukowono	374,098,834	222,491,299	59.47	151,607,535	
20	Kaliwates	4,440,953,108	2,615,682,076	58.90	1,825,271,032	
21	Puger	1,153,937,849	616,315,057	53.41	537,622,792	
22	Patrang	1,593,719,479	847,556,703	53.18	746,162,776	
23	Panti	443,531,019	233,854,869	52.73	209,676,150	
24	Pakusari	445,849,378	232,480,885	52.14	213,368,493	
25	Mayang	423,329,462	211,703,144	50.01	211,626,318	
26	Sumbersari	2,815,628,218	1,346,909,018	47.84	1,468,719,200	
27	Sukorambi	374,982,984	178,658,272	47.64	196,324,712	
28	Kalisat	507,154,026	238,303,347	46.99	268,850,679	
29	Ajung	779,476,137	359,327,328	46.10	420,148,809	
30	Mumbulsari	376,830,962	165,981,003	44.05	210,849,959	
31	Arjasa	291,113,241	99,112,748	34.05	192,000,493	
	JUMLAH	25,644,787,641	16,612,707,434	64.78	9,032,080,207	

Jember, 26 September 2013

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER

Drs. SUPRAPTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610721 198603 1 011

DAFTAR REALISASI PBB SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN TAHUN 2012
KABUPATEN JEMBER
S/D TANGGAL 31 DESEMBER 2013

NO.	KECAMATAN	BAKU	REALISASI	%	SISA	KETERANGAN
1	Ambulu	945,417,615	946,340,367	100.10	(922,752)	Lunas, 17-09-2012
2	Semboro	435,553,059	406,686,670	93.37	28,866,389	
3	Kencong	696,758,563	592,288,456	85.01	104,470,107	
4	Umbulsari	1,137,192,359	959,305,345	84.36	177,887,014	
5	Gumukmas	786,566,539	645,443,473	82.06	141,123,066	
6	Batung	850,871,275	697,556,167	81.98	153,315,108	
7	Bangsalsari	751,426,222	605,203,993	80.54	146,222,229	
8	Tanggul	534,064,151	417,388,624	78.15	116,675,527	
9	Jombang	600,313,861	458,928,254	76.45	141,385,607	
10	Silo	402,082,625	303,188,053	75.40	98,894,572	
11	Rambipuji	751,199,231	553,300,754	73.66	197,898,477	
12	Tempurejo	308,884,217	220,332,117	71.33	88,552,100	
13	Kaliwates	4,520,551,630	3,145,536,676	69.58	1,375,014,954	
14	Sumberjambe	436,012,200	299,960,442	68.80	136,051,758	
15	Ledokombo	389,507,376	265,733,348	68.22	123,774,028	
16	Sumberbaru	570,965,178	376,349,746	65.91	194,615,432	
17	Sukorambi	371,756,387	240,786,844	64.77	130,969,543	
18	Sukowono	368,361,605	229,103,412	62.20	139,258,193	
19	Panti	442,924,996	275,254,636	62.14	167,670,360	
20	Wuluh	995,509,247	582,972,783	58.56	412,536,464	
21	Pakusari	444,639,205	245,725,348	55.26	198,913,857	
22	Puger	1,152,231,365	630,648,862	54.73	521,582,503	
23	Jenggawah	987,419,289	531,960,879	53.87	455,458,410	
24	Sumpalsari	2,842,706,384	1,462,902,429	51.46	1,379,803,955	
25	Ajung	775,577,217	393,883,580	50.79	381,693,637	
26	Patrang	1,593,931,869	795,725,023	49.92	798,206,846	
27	Kalisat	540,745,124	268,232,918	49.60	272,512,206	
28	Mayang	422,606,437	199,013,486	47.09	223,592,951	
29	Jelbuk	296,252,007	125,947,816	42.51	170,304,191	
30	Arjasa	291,142,413	93,617,762	32.16	197,524,651	
31	Mumbulsari	378,779,830	96,790,539	25.55	281,989,291	
	JUMLAH	26,021,949,476	17,066,108,802	65.58	8,955,840,674	

Jember, 6 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER

Drs. SUPRAPTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610721 198603 1 011

DAFTAR REALISASI PBB PERKOTAAN DAN PEDESAAN TAHUN 2013
KABUPATEN JEMBER
 S/D TANGGAL 11 MARET 2014

NO.	KECAMATAN	BAKU	REALISASI	%	SISA	KETERANGAN
1	Pakusari	498,504,000	509,360,038	102.18	(10,856,038)	Lunas 24-12-2013
2	Sumberbaru	676,575,537	684,957,469	101.24	(8,381,932)	Lunas 13-12-2013
3	Bangsalsari	905,770,750	916,199,649	101.15	(10,428,899)	
4	Tanggul	622,660,138	629,103,213	101.03	(6,443,075)	Lunas 12-12-2013
5	Semboro	483,563,282	486,726,157	100.65	(3,162,875)	Lunas 04-12-2013
6	Jombang	673,383,539	677,591,802	100.62	(4,208,263)	Lunas 11-12-2013
7	Ledokombo	494,495,969	496,480,898	100.40	(1,984,929)	
8	Wuluhan	1,173,704,999	1,177,818,914	100.35	(4,113,915)	Lunas 23-12-2013
9	Umbulsari	1,298,664,550	1,301,649,503	100.23	(2,984,953)	Lunas 05-12-2013
10	Balung	942,912,501	942,672,176	99.97	240,325	Lunas 12-12-2013
11	Ambulu	1,063,487,152	1,061,344,428	99.80	2,142,724	Lunas 30-09-2013
12	Silo	521,420,188	516,015,130	98.96	5,405,058	
13	Gumukmas	955,321,058	923,929,961	96.71	31,391,097	
14	Sukowono	448,832,312	432,503,042	96.36	16,329,270	
15	Sukorambi	403,498,110	381,513,040	94.55	21,985,070	
16	Kencong	774,973,613	728,945,259	94.06	46,028,354	
17	Puger	1,306,081,711	1,187,135,811	90.89	118,945,900	
18	Jelbuk	350,993,312	318,334,972	90.70	32,658,340	
19	Rambipuji	817,173,858	732,734,887	89.67	84,438,971	
20	Tempurejo	373,743,305	323,645,038	86.60	50,098,267	
21	Kalisat	652,071,805	532,568,195	81.67	119,503,610	
22	Mayang	470,381,269	365,509,486	77.70	104,871,783	
23	Sumberjambe	536,023,879	405,465,061	75.64	130,558,818	
24	Ajung	846,700,980	639,316,035	75.51	207,384,945	
25	Arjasa	342,234,056	252,799,083	73.87	89,434,973	
26	Kaliwates	4,717,355,298	3,390,534,064	71.87	1,326,821,234	
27	Panti	518,286,230	360,605,920	69.58	157,680,310	
28	Jenggawah	1,084,701,339	710,202,143	65.47	374,499,196	
29	Patrang	1,672,054,971	1,027,993,273	61.48	644,061,698	
30	Sumbersari	3,002,909,779	1,671,569,181	55.66	1,331,340,598	
31	Mumbulsari	448,841,477	242,393,949	54.00	206,447,528	
	JUMLAH	29,077,320,967	24,027,617,777	82.63	5,088,976,009	

Jember, 12 Maret 2014

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER

Drs. SUPRAPTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610721 198603 1 011

DAFTAR REALISASI PBB PERKOTAAN DAN PEDESAAN TAHUN 2014
KABUPATEN JEMBER
S/D TANGGAL 9 JUNI 2015

NO.	KECAMATAN	B A K U	REALISASI	%	S I S A	KETERANGAN
1	Ambulu	1,723,466,112	1,721,952,308	99.91	1,513,804	
2	Balung	1,613,952,747	1,552,487,529	96.19	61,465,218	
3	Wuluhan	1,988,290,924	1,899,384,157	95.53	88,906,767	
4	Rambipuji	1,346,267,637	1,253,932,604	93.14	92,335,033	
5	Umbulsari	2,262,979,591	2,077,081,945	91.79	185,897,646	
6	Semboro	856,434,988	750,810,873	87.67	105,624,115	
7	Bangsalsari	1,382,729,416	1,204,038,473	87.08	178,690,943	
8	Gumukmas	1,721,294,722	1,428,452,880	82.99	292,841,842	
9	Tanggul	1,102,355,001	909,665,610	82.52	192,689,391	
10	Kencong	1,329,598,062	1,077,772,382	81.06	251,825,680	
11	Sukowono	725,657,586	577,691,183	79.61	147,966,403	
12	Jombang	1,180,732,315	928,375,339	78.63	252,356,976	
13	Tempurejo	674,588,797	501,988,114	74.41	172,600,683	
14	Puger	2,194,151,579	1,626,863,385	74.15	567,288,194	
15	Pakusari	766,012,278	567,679,077	74.11	198,333,201	
16	Kaliwates	7,503,946,424	5,518,556,604	73.54	1,985,389,820	
17	Sumberbaru	1,299,302,919	954,889,825	73.49	344,413,094	
18	Kalisat	1,094,240,325	754,828,981	68.98	339,411,344	
19	Silo	1,077,434,609	741,110,778	68.78	336,323,831	
20	Ledokombo	842,038,679	558,969,193	66.38	283,069,486	
21	Sumbersari	4,734,224,139	2,908,452,470	61.43	1,825,771,669	
22	Patrang	2,855,470,197	1,712,643,966	59.98	1,142,826,231	
23	Ajung	1,438,261,615	800,079,608	55.63	638,182,007	
24	Jenggawah	1,850,641,596	1,028,153,051	55.56	822,488,545	
25	Sukorambi	670,053,951	369,592,602	55.16	300,461,349	
26	Panti	836,313,283	456,491,257	54.58	379,822,026	
27	Arjasa	592,012,787	258,891,212	43.73	333,121,575	
28	Jelbuk	601,560,596	258,737,314	43.01	342,823,282	
29	Mayang	756,961,857	265,637,220	35.09	491,324,637	
30	Sumberjambe	981,473,476	311,750,870	31.76	669,722,606	
31	Mumbulsari	788,358,138	194,233,078	24.64	594,125,060	
	JUMLAH	48,790,806,346	35,171,193,888	72.09	13,619,612,458	

Jember, 9 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER

Drs. SUPRAPTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610721 198603 1 011

DAFTAR REALISASI PBB PERKOTAAN DAN PEDESAAN TAHUN 2015
KABUPATEN JEMBER
S/D TANGGAL 31 MARET 2016

NO.	KECAMATAN	BAKU	REALISASI	%	SISA	KETERANGAN
1	Ambulu	1,803,973,916	1,735,166,121	96.19	68,807,795	
2	Balung	1,612,859,165	1,513,176,466	93.82	99,682,699	
3	Wuluh	1,993,518,293	1,824,042,710	91.50	169,475,583	
4	Semboro	859,953,207	744,235,743	86.54	115,717,464	
5	Umbulsari	2,262,266,603	1,920,874,117	84.91	341,392,486	
6	Rambipuji	1,354,162,895	1,149,113,851	84.86	205,049,044	
7	Kencong	1,348,193,122	1,074,899,977	79.73	273,293,145	
8	Tanggul	1,111,731,518	844,939,095	76.00	266,792,423	
9	Silo	1,083,754,206	783,176,390	72.27	300,577,816	
10	Sumberbaru	1,302,561,303	916,721,132	70.38	385,840,171	
11	Kaliwates	7,713,710,214	5,377,061,566	69.71	2,336,648,648	
12	Jombang	1,180,948,966	790,692,604	66.95	390,256,362	
13	Gumukmas	1,726,531,212	1,017,437,988	58.93	709,093,224	
14	Puger	2,200,262,963	1,277,162,716	58.05	923,100,247	
15	Sukowono	731,805,526	416,950,584	56.98	314,854,942	
16	Bangsalsari	1,507,083,277	845,412,402	56.10	661,670,875	
17	Sumbersari	4,766,843,834	2,658,248,893	55.77	2,108,594,941	
18	Sukorambi	673,524,767	375,586,503	55.76	297,938,264	
19	Ajung	1,462,944,514	810,557,601	55.41	652,386,913	
20	Patrang	2,887,462,401	1,531,835,816	53.05	1,355,626,585	
21	Pakusari	756,786,608	388,675,456	51.36	368,111,152	
22	Jenggawah	1,843,212,309	935,679,242	50.76	907,533,067	
23	Panti	886,843,523	433,963,459	48.93	452,880,064	
24	Jelbuk	604,137,220	294,469,041	48.74	309,668,179	
25	Tempurejo	674,682,022	316,539,859	46.92	358,142,163	
26	Ledokombo	849,418,089	288,495,621	33.96	560,922,468	
27	Kalisat	1,104,071,702	363,431,505	32.92	740,640,197	
28	Arjasa	591,474,927	169,952,824	28.73	421,522,103	
29	Sumberjambe	985,205,075	262,100,894	26.60	723,104,181	
30	Mayang	823,704,456	179,699,990	21.82	644,004,466	
31	Mumbulsari	796,750,361	139,260,694	17.48	657,489,667	
	JUMLAH	49,500,378,194	31,379,560,860	63.39	18,120,817,334	

Jember, 1 April 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER

Drs. SUPRAPTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610721 198603 1 011

LAMPIRAN 4. Rasio Ekonomi

$$\text{Rasio ekonomis} = \frac{\text{Target biaya operasional pemungutan PBBP2}}{\text{Realisasi biaya operasional pemungutan PBBP2}}$$

No	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Ajung	0.538	0.461	0.508	0.566	0.278	0.277
2	Ambulu	0.994	1.000	1.001	0.998	0.999	0.721
3	Arjasa	0.279	0.340	0.322	0.369	0.109	0.072
4	Balung	0.915	0.808	0.820	1.000	0.721	0.704
5	Bangsalsari	0.723	0.757	0.805	1.012	0.653	0.280
6	Gumukmas	0.851	0.886	0.821	0.725	0.622	0.295
7	Jelbuk	0.666	0.703	0.425	0.680	0.108	0.122
8	Jenggawah	0.676	0.643	0.539	0.327	0.278	0.254
9	Jombang	0.770	0.775	0.764	1.006	0.590	0.335
10	Kalisat	0.370	0.470	0.496	0.613	0.345	0.082
11	Kaliwates	0.550	0.589	0.696	0.359	0.368	0.349
12	Kencong	0.733	0.813	0.850	0.705	0.608	0.598
13	Ledokombo	0.693	0.650	0.682	1.004	0.332	0.085
14	Mayang	0.372	0.500	0.471	0.583	0.088	0.055
15	Mumbulsari	0.201	0.440	0.256	0.270	0.062	0.044
16	Pakusari	0.470	0.521	0.553	1.022	0.371	0.257
17	Panti	0.555	0.527	0.621	0.348	0.273	0.245
18	Patrang	0.496	0.532	0.499	0.307	0.300	0.265
19	Puger	0.423	0.534	0.547	0.682	0.371	0.290
20	Rambipuji	0.801	0.835	0.737	0.673	0.699	0.636
21	Semboro	0.920	0.925	0.934	1.007	0.658	0.649
22	Silo	0.759	0.770	0.754	0.742	0.344	0.361
23	Sukorambi	0.449	0.476	0.648	0.709	0.276	0.279
24	Sukowono	0.679	0.595	0.622	0.723	0.597	0.285
25	Sumberbaru	0.686	0.701	0.659	1.012	0.367	0.352
26	Sumberjambe	0.627	0.685	0.688	0.567	0.159	0.133
27	Sumbersari	0.481	0.478	0.515	0.278	0.307	0.279
28	Tanggul	0.727	0.819	0.782	1.010	0.619	0.570
29	Tempurejo	0.681	0.746	0.713	0.649	0.372	0.117
30	Umbulsari	0.850	0.914	0.844	1.002	0.688	0.637
31	Wuluhan	0.643	0.643	0.586	1.004	0.716	0.686

LAMPIRAN 5. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi biaya operasional pemungutan PBBP2}}{\text{Realisasi penerimaan PBBP2}}$$

No	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Ajung	0.09	0.09	0.09	0.0375	0.025	0.025
2	Ambulu	0.09	0.09	0.09	0.05	0.05	0.0375
3	Arjasa	0.09	0.09	0.09	0.025	0.0125	0.0125
4	Balung	0.09	0.09	0.09	0.05	0.0375	0.0375
5	Bangsalsari	0.09	0.09	0.09	0.05	0.0375	0.025
6	Gumukmas	0.09	0.09	0.09	0.0375	0.0375	0.025
7	Jelbuk	0.09	0.09	0.09	0.0375	0.0125	0.0125
8	Jenggawah	0.09	0.09	0.09	0.025	0.025	0.025
9	Jombang	0.09	0.09	0.09	0.05	0.0375	0.025
10	Kalisat	0.09	0.09	0.09	0.0375	0.025	0.0125
11	Kaliwates	0.09	0.09	0.09	0.025	0.025	0.025
12	Kencong	0.09	0.09	0.09	0.0375	0.0375	0.0375
13	Ledokombo	0.09	0.09	0.09	0.05	0.025	0.0125
14	Mayang	0.09	0.09	0.09	0.0375	0.0125	0.0125
15	Mumbulsari	0.09	0.09	0.09	0.025	0.0125	0.0125
16	Pakusari	0.09	0.09	0.09	0.05	0.025	0.025
17	Panti	0.09	0.09	0.09	0.025	0.025	0.025
18	Patrang	0.09	0.09	0.09	0.025	0.025	0.025
19	Puger	0.09	0.09	0.09	0.0375	0.025	0.025
20	Rambipuji	0.09	0.09	0.09	0.0375	0.0375	0.0375
21	Semboro	0.09	0.09	0.09	0.05	0.0375	0.0375
22	Silo	0.09	0.09	0.09	0.0375	0.025	0.025
23	Sukorambi	0.09	0.09	0.09	0.0375	0.025	0.025
24	Sukowono	0.09	0.09	0.09	0.0375	0.0375	0.025
25	Sumberbaru	0.09	0.09	0.09	0.05	0.025	0.025
26	Sumberjambe	0.09	0.09	0.09	0.0375	0.025	0.025
27	Sumbersari	0.09	0.09	0.09	0.025	0.025	0.025
28	Tanggul	0.09	0.09	0.09	0.05	0.0375	0.0375
29	Tempurejo	0.09	0.09	0.09	0.0375	0.025	0.0125
30	Umbulsari	0.09	0.09	0.09	0.05	0.0375	0.0375
31	Wuluhan	0.09	0.09	0.09	0.05	0.0375	0.0375

LAMPIRAN 6. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PBBP2}}{\text{Target penerimaan PBBP2}}$$

No	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Ajung	0.5378	0.4610	0.5079	0.7551	0.5563	0.5541
2	Ambulu	0.9941	1.0000	1.0010	0.9980	0.9991	0.9619
3	Arjasa	0.2789	0.3405	0.3216	0.7387	0.4373	0.2873
4	Balung	0.9148	0.8085	0.8198	0.9997	0.9619	0.9382
5	Bangsalsari	0.7231	0.7568	0.8054	1.0115	0.8708	0.5610
6	Gumukmas	0.8514	0.8860	0.8206	0.9671	0.8299	0.5893
7	Jelbuk	0.6662	0.7027	0.4251	0.9070	0.4301	0.4874
8	Jenggawah	0.6761	0.6431	0.5387	0.6547	0.5556	0.5076
9	Jombang	0.7702	0.7753	0.7645	1.0062	0.7863	0.6695
10	Kalisat	0.3704	0.4699	0.4960	0.8167	0.6898	0.3292
11	Kaliwates	0.5500	0.5890	0.6958	0.7187	0.7354	0.6971
12	Kencong	0.7332	0.8132	0.8501	0.9406	0.8106	0.7973
13	Ledokombo	0.6927	0.6499	0.6822	1.0040	0.6638	0.3396
14	Mayang	0.3724	0.5001	0.4709	0.7770	0.3509	0.2182
15	Mumbulsari	0.2014	0.4405	0.2555	0.5400	0.2464	0.1748
16	Pakusari	0.4699	0.5214	0.5526	1.0218	0.7411	0.5136
17	Panti	0.5553	0.5273	0.6214	0.6958	0.5458	0.4893
18	Patrang	0.4956	0.5318	0.4992	0.6148	0.5998	0.5305
19	Puger	0.4226	0.5341	0.5473	0.9089	0.7415	0.5805
20	Rambipuji	0.8008	0.8354	0.7366	0.8967	0.9314	0.8486
21	Sembo	0.9202	0.9247	0.9337	1.0065	0.8767	0.8654
22	Silo	0.7586	0.7698	0.7540	0.9896	0.6878	0.7227
23	Sukorambi	0.4490	0.4764	0.6477	0.9455	0.5516	0.5576
24	Sukowono	0.6794	0.5947	0.6220	0.9636	0.7961	0.5698
25	Sumberbaru	0.6861	0.7010	0.6591	1.0124	0.7349	0.7038
26	Sumberjambe	0.6275	0.6851	0.6880	0.7564	0.3176	0.2660
27	Sumbersari	0.4808	0.4784	0.5146	0.5566	0.6143	0.5577
28	Tanggul	0.7272	0.8192	0.7815	1.0103	0.8252	0.7600
29	Tempurejo	0.6808	0.7461	0.7133	0.8660	0.7441	0.4692
30	Umbulsari	0.8504	0.9140	0.8436	1.0023	0.9179	0.8491
31	Wuluhan	0.6430	0.6427	0.5856	1.0035	0.9553	0.9151

LAMPIRAN 7. Hasil Wawancara

Narasumber : Suyanto, S.H

Jabatan : Sekertaris Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Tanggal : 26 Mei 2016

Waktu : Pukul 10.00 – 11.30

Lokasi : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
(Jalan Jawa No. 72 Sumbersari Jember)

Peneliti : *Sejak kapan pengalihan PBB-P2 Kabupaten Jember resmi dilakukan?*

Narasumber : Sejak September 2013

Peneliti : *Apakah Dinas Pendapatan sudah melakukan persiapan regulasi pengalihan PBB-P2 seperti Perda, Perbup, dan SOP?*

Narasumber : Untuk Perda sudah, yaitu Perda Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember. Untuk SOP belum ada, rencananya ditahun 2016 ini SOP sudah selesai dibuat, rencana itu ada 5 SOP diantaranya SOP klasifikasi dan penetapan NJOP, SOP penerbitan dan penandatanganan SPPT, SOP pendistribusian SPPT PBB-P2, SOP pelayanan, SOP pemberian pengurangan PBB-P2, dan SOP pengembalian kelebihan bayar PBB-P2. Untuk sementara Dinas Pendapatan Kabupaten Jember berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2012 itu.

Peneliti : *Untuk persiapan personil, apakah telah dilakukan bimbingan teknis atau workshop?*

Narasumber : Sudah diantaranya Bimbingan Teknis 3 orang dibanding tentang Teknis Informasi pengoperasional program SISMIOP, 12 orang tentang pendataan PBB-P2, dan 20 orang tentang Penilaian PBB-P2. Kita juga mengirimkan 20 orang untuk magang pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Pemerintah Kota Surabaya, selain itu juga Magang pada Kantor Pajak Pratama Jember sekitar 20 orang.

Peneliti : *Apakah sudah ada struktur organisasi khusus untuk PBB-P2?*

Narasumber : Struktur khusus gak ada, jadi kita berpedoman pada struktur organisasi Dinas Pendapatan ini.

Peneliti : *Untuk sarana dan prasarana apa saja yang disiapkan?*

Narasumber : Kalau fasilitas kantor seperti gedung atau ruangan, kita pakai ruangan di Dinas ini yang sebelah *musollah* itu, disana tempat administrasi pengelolaan, informasi, dan pelayanan.

Peneliti : *Dimana lokasi pembayaran PBB dilakukan?*

Narasumber : Pembayaran bisa di Bank Jatim, kita sudah melakukan prosedur untuk melakukan kerja sama, bisa juga lewat kantor pos, karena mungkin di kecamatan tertentu bank Jatim jauh jadi bisa lewat bank, atau juga bisa lewat aparat kelurahan atau desa. Aparat ini kita ajak bekerjasama karena Jember kan luas, banyak wilayah yang jauh sulit dijangkau, jadi untuk penyampaian SPPT kita serahkan lewat aparat kelurahan atau desa. Biar gak ada alasan warga gak bayar pajak atau gak tau pajak.

Peneliti : *Bagaimana cara untuk memberikan sosialisasi tentang PBB-P2?*

Narasumber : Sosialisasi itu banyak ya bisa internal Pemda, ke masyarakat, ke pihak terkait seperti notaris/PPAT. Kalau ke masyarakat kita kadang sosialisasi langsung turun ke kecamatan atau desa, pasang banner ditempat yang ramai, yang masyarakat bisa melihat atau membaca juga, itu juga sosialisasi tapi gak langsung, lewat koran juga pernah kita usahakan. Dan juga lewat internet seperti di web Dinas Pendapatan ada gambar seperti ajakan membayar PBB

Peneliti : *Apa faktor yang mengakibatkan keberhasilan atau kegagalan penerimaan PBB-P2?*

Narasumber : Proses pengalihannya ya jadi gampang pastinya kalau ada dana, kalau gak ada dana gak bisa jalan. Selain dana ya perlu adanya kerja sama yang baik dari KPP Pratama atau SKPD terkait

Peneliti : *Apakah ada perbedaan dasar menentukan besar Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah?*

Narasumber : Kalau dulu BOP itu 9% sekarang 5%

Peneliti : *Apakah realisasi BOP sebelum dan setelah pengalihan lebih rendah dari target BOP?*

Narasumber : Sepertinya sudah lebih rendah ya, karena target BOP ditentukan dari target penerimaan, realisasi BOP ditentukan dari besarnya realisasi penerimaan.

Peneliti : *Apabila dibandingkan antara target dan realisasi BOP, lebih baik sebelum atau setelah pengalihan?*

Narasumber : Kalau target BOP dulu 9% dari target penerimaan PBB-P2 lalu realisasinya ya 9% Kalau sekarang beda, untuk target acuannya 5% dari target penerimaan PBB-P2, untuk realisasinya juga gak langsung 5% jadi dari 5% itu bertahap pencapaian (PBB-P2) 10-25% realisasinya 25% dari 5%, trus 26-50% realisasinya 50% dari 5%, 51-75% realisasinya 75% dari 5%, baru kalau sudah mencapai 100% kita beri 5% dari hasil pemungutan itu. Jadi lebih baik sekarang (setelah menjadi pajak daerah) meningkat karena biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kinerja yang dilakukan.”

Peneliti : *Jika dilihat dari perbandingan BOP dengan Penerimaan PBB-P2 lebih baik sebelum atau sesudah menjadi pajak daerah?*

Narasumber : Kalau sebelum pengalihan 10% dari realisasi penerimaan PBB-P2 untuk pusat, 16.2% untuk provinsi, 64.8% untuk kabupaten/kota, dan 9% untuk biaya pemungutan. Kalau sekarang semua penerimaan masuk ke daerah (kabupaten/kota) lalu kita menentukan biaya pemungutan hanya 5% dari penerimaan PBB-P2 jadi penerimaan seharusnya lebih besar sekarang bisa dikatakan lebih efisien sekarang. Jadi menambah sumber Pendapatan Asli Daerah.

Peneliti : *Sedangkan jika dilihat dari perbandingan target dan realisasi penerimaannya, lebih baik sesudah atau sebelum pengalihan?*

Narasumber : Kita mengharapkan hasil yang maksimal ya, inginnya 100%, tapi ini kan kerjasama antara petugas dan masyarakat, kalau petugasnya rajin tapi masyarakat belum sadar pentingnya bayar pajak ya sulit juga mencapai target.

Peneliti : *Strategi apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2?*

Narasumber : Strategi kita untuk meningkatkan PBB-P2 ya awalnya sosialisasi itu kepada petugas Kecamatan/Desa, lalu kita juga sudah memasang baner pada setiap desa dan spanduk dipinggiran kota seperti di jembatan semanggi dan tempat-tempat ramai, himbauan melalui koran juga, dan kita pakai mobil keliling, biasanya warga kan malas karena jauh jadi kita datangi. Kalau masalah kecurangan petugas pemungut kita sewaktu-waktu melakukan *cross-check* data langsung terjun ke daerah-daerah realisasi penerimaannya kecil, mungkin ada kendala kita kasih solusi, kalau ada kecurangan kita tangani

Narasumber : Hendra
Jabatan : Kasie Penagihan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
Tanggal : 27 Mei 2016
Waktu : Pukul 09.15 – 11.00
Lokasi : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
Jalan Jawa Nomor 72 Sumbersari Jember

Peneliti : Sejak kapan PBB-P2 resmi dikelola Dinas Pendapatan Kabupaten Jember?

Narasumber : Kalau gak salah sejak tahun 2013 ya, dari pusat itu diperintahkannya tahun 2010 lalu prosesnya kan panjang harus banyak yang dipersiapkan, jadi 2013 baru bisa melakukan pemungutan lewat Dinas ini.

Peneliti : Apakah ada dasar hukum pengalihan pengelolaan PBB-P2?

Narasumber : Jelas harus ada, biar gak jadi pungutan liar. Perda Tentang Pajak Daerah Nomor 3 tahun 2011 dan Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember

Peneliti : Selain Perda apakah ada peraturan lain mengenai PBB-P2?

Narasumber : Iya ada, kan Perda itu dari pusat diharuskan, setelah menetapkan Perda harus ada peraturan tentang beberapa hal yang belum dicantumkan di Perda seperti sanksi administrasi atau lainnya, jadi diterbitkan juga Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Jember

Peneliti : Selain persiapan hukum apa saja yang harus disiapkan?

Narasumber : Ya banyak ya ada seperti fasilitas, pembiayaan, karyawan untuk bagian PBB

Peneliti : *Untuk karyawan atau SDM bagaimana perekrutannya?*

Narasumber : Rekrut karyawan kita belum dari luar ya, kita memanfaatkan karyawan Dinas dulu, menentukan SDM ini gak gampang, karena butuh banyak tenaga karena objek pajak tiap daerah jumlahnya banyak, harus ada tenaga fungsional seperti tenaga penilai, pengawas, dan operator. Selain jumlah yang banyak gak semua karyawan bisa ditunjuk jadi perlu mengutus karyawan yang memiliki keahlian khusus. Sekarang kita ada 37 karyawan khusus menangani PBB

Peneliti : *Untuk sarana dan prasarana, Dinas apakah sudah menyiapkan seluruhnya?*

Narasumber : Ada sarana TI seperti CPU, printer, *plotter*, komputer dan laptop, instalasi, serta *hard* dan *soft system* pelayanan elektronik. Sebisa mungkin kita gunakan sarana prasarana yang sudah ada jadi gak pemborosan

Peneliti : *Apakah pengalihan pengelolaan PBB-P2 memerlukan kerjasama dengan pihak lain?*

Narasumber : Kerjasama pasti ya dilakukan karena kita gak bisa jalan sendiri, KPP Pratama Jember itu selalu mendampingi biar lancar dari proses pengelolaan sampai pemungutan, karena awalnya yang mengelola kan KPP jadi KPP banyak pengalaman, itu di share ke kita. Selain itu kita kerja sama dengan tempat pembayaran, kita memilih Bank Jatim, kita sudah melakukan kerjasama dengan bank Jatim. Bisa di bank Jatim pusat atau cabang, di Dinas ini juga ada cabang bank Jatim itu didepan

gedung pengelolaan PBB, jadi uang bukan kita yang terima, itu pihak bank yang terima

Peneliti : *Untuk sosialisasi PBB-P2 bagaimana?*

Narasumber : Kita sosialisasi ya secara langsung ke masyarakat, atau kita sosialisasi ke orang-orang kelurahan nanti mereka yang sosialisasi ke masyarakat. Selain sosialisasi langsung kita juga pasang banner hampir disetiap kecamatan justru hampir setiap desa kita usahakan ada

Peneliti : *Sejauh ini apakah ada hal yang menghambat atau justru mendorong kesuksesan pemungutan PBB-P2 setelah menjadi pajak daerah?*

Narasumber : Kalau faktor pendukung ya adanya pembiayaan yang mendukung, jadi semua harus benar-benar diperhitungkan karena pembiayaannya gak sedikit, untuk pembiayaan ini *Alhamdulillah* terpenuhi, jadi gak menghambat kinerja kita. Iya gak semua jalan dengan mudah ya, jadi pasti ada penghambatnya, seperti kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, kurangnya SDM yang berkompetensi untuk menanganai PBB ini, kecurangan aparat kelurahan yang pakai uang masyarakat, banyak masalahnya yang lain.

Peneliti : *Apakah ada perbedaan ketentuan BOP PBB-P2 sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah?*

Narasumber : Kalau dulu ketentuan pusat 9% kalau sekarang hanya 5%, setiap daerah itu berbeda-beda tergantung kebijakan daerahnya.

Peneliti : *Apakah dasar penentuan target dan realisasi BOP PBB-P2?*

Narasumber : Ya seperti tadi, kita tetapkan 5%, jadi kalau buat target BOP ya 5% dari target penerimaan PBB, realisasinya juga beda nanti karena pasrti kan realisasi penerimaan PBB nya beda, kita cairkan sesuai dengan 5% dari realisasi penerimaan yang sudah dilakukan.

Peneliti : *Jadi lebih baik sekarang atau sebelumnya?*

Narasumber : Kalau dilihat dari BOP jelas lebih baik sekarang, soalnya sebelum menjadi pajak daerah (PBB-P2) target biaya operasional pemungutan (BOP) ditargetkan 9% dari target penerimaan. Kalau sekarang beda, sekarang target BOP 5% dari target penerimaan, dan itupun untuk merealisasikannya tidak langsung 5% tetapi sesuai dengan persentase penerimaan PBB-P2 nya.

Peneliti : *Jika dilihat berdasarkan perbandingan biaya dan penerimaan lebih efektif sekarang atau sebelum pengalihan PBB-P2?*

Narasumber : Lebih efisien sekarang, dilihat dari BOP hanya 5% kalau dulu 9% lalu dari penerimaan dulu kita hanya menerima sekitar 64.8% kalau sekarang sudah 100%.”

Peneliti : *Strategi khusus apa yang dilakukan Dinas Pendapatan agar dengan BOP lebih rendah dari sebelumnya ini dapat meningkatkan penerimaannya?*

Narasumber : Strategi kita biar tercapai maksimal ya dengan memberikan BOP kepada Kecamatan secara bertahap gak langsung 5% dari penerimaan itu. Jadi kalau bulan tertentu bisa merealisasikan penerimaan Kecamatannya 100% kita kasih 5%, kalau penerimaannya 10 - 25% penerimaannya ya kita kasih 1.25%, kalau 26 – 50% kita kasih 2.5%.Intinya bertahap, selain itu kita beri *reward* juga untuk Kecamatan yang pada bulan tertentu sudah lunas.Jadi setiap

Kecamatan berlomba-lomba segera melunasi PBB-P2, semakin besar realisasinya semakin besar BOP yang diterima.”

Peneliti : *apakah penerimaan PBB-P2 setiap tahun meningkat?*

Narasumber : Kalau total penerimaannya PBB-P2 dari tahun ke tahun meningkat, hanya di tahun 2015 saja mengalami penurunan. Kalau kita mengharapkannya ya hasil maksimal, tapi banyak hal lain yang membuat jadi belum tercapai, misalnya kurangnya kesadaran masyarakat sendiri membayar PBB atau petugas yang curang memakai uang yang sudah masyarakat bayar. Kalau dibanding dari sebelum kami yang kelola pasti ada peningkatan karena kita melakukan banyak cara agar masyarakat mau bayar PBB

Peneliti : *Apakah strategi yang dilakukan agar mencapai target penerimaan?*

Narasumber : Kita sudah banyak memasang baner dan spanduk, hampir setiap desa kita pasang biar masyarakat baca jadi tau kalau PBB ini penting, selain itu ya kita juga terjun ke masyarakat pakai mobil keliling soalnya kadang orang mikir jauh bayar di Dispenda ke Bank juga jauh, jadi kita rutinlah keliling.

LAMPIRAN 8. Surat Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
DINAS PENDAPATAN
Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN
Nomor : 800/ 130/35.09.422/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUYANTO, SH
NIP : 19640106 199703 1 004
Pangkat / Gol. : Pembina Gol. IV/a
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

Nama : Kusdian Dwi Prasasti
NIM : 120810301068
Fakultas : Fakultas Ekonomi (Jurusan Akuntansi)
Universitas Jember

Telah selesai melaksanakan penelitian tentang " **Analisis Perbandingan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebelum dan Sesudah Menjadi Pajak Daerah Kabupaten Jember Dengan Konsep Value For Money** ", Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 26 Mei 2016 s/d 27 Mei 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 Mei 2016

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS


SUYANTO, SH
Pembina
NIP. 19640106 199703 1 004